

ANALISA

1986 – 5

Pendidikan dan Kebangkitan Nasional

Pendidikan Manusia dan
Lingkungan Pendidikan yang Mempengaruhinya

Pendidikan dalam Dunia Usaha

Latihan Ketrampilan dan Teknik Pengelolaannya

Relevansi Kebangkitan Nasional

Semangat Kebangsaan dan Dinamika Masyarakat

Perubahan Masyarakat: Beberapa Masalah
Pendidikan dan Peranan Para Pemuka Masyarakat

Mobilisasi Profesional Muda di Jakarta



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Medelina KUSHARWANTI
S. TJOKROWARDOJO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Tata Usaha

Harga Rp 750,00 per eksemplar; langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim) Rp 9.000,00, untuk Mahasiswa Rp 6.750,00. Pesanan ke Biro Publikasi CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Daftar Isi

HUN XV, NO. 5, MEI 1986 338

Pengantar Redaksi	338
Pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan yang Mempengaruhinya <i>Daoed JOESOEF</i>	341
Pendidikan dalam Dunia Usaha <i>Ronald NANGOI</i>	355
Latihan Ketrampilan dan Teknik Pengelolaannya <i>BABARI</i>	363
Relevansi Kebangkitan Nasional <i>Cosmas BATUBARA</i>	376
Semangat Kebangsaan dan Dinamika Masyarakat <i>Medelina KUSHARWANTI</i>	386
Perubahan Masyarakat: Beberapa Masalah Pergeseran Peranan Para Pemuka Masyarakat <i>SUKANTO</i>	394
Mobilitas Profesional Muda di Jakarta <i>Iwan P. HUTAJULU</i>	406

Pengantar Redaksi

Pada bulan Mei ini, Indonesia memperingati dua hari bersejarah, yaitu Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Betapa pentingnya makna dari peringatan tersebut tidak perlu diragukan lagi dan sehingga atas dasar ini ANALISA kali ini mengambil tema "Pendidikan dan Kebangkitan Nasional" dengan menyetengahkan tujuh buah tulisan.

Tulisan pertama yang berjudul "Pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan yang Mempengaruhinya" ditulis oleh Daoed JOESOEF. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa sesuai dengan asasnya, maka pendidikan merupakan campur tangan untuk mempengaruhi manusia dalam perkembangan alamiahnya. Yang kemudian menjadi tantangan adalah mencari cara agar pendidikan dapat melaksanakan fungsi implisitnya. Untuk ini penulis berpendapat bahwa jawabannya adalah dengan jalan mempengaruhi "sebab-sebab" dari tingkah-laku manusia. Selanjutnya, karena tingkah-laku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya maka lingkungan tersebut perlu ditata untuk mengkondisikan perwujudan tingkah-laku yang didambakan yang kemudian dijadikan sebagai nilai yang dituju oleh pendidikan.

Tulisan kedua yang berjudul "Pendidikan dalam Dunia Usaha" oleh Ronald NANGOI, menyoroti usaha peningkatan sumberdaya manusia melalui program-program pendidikan manajerial dan ketrampilan. Menurut penulis, peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan manajerial dan ketrampilan sangat diperlukan baik dalam masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Apa yang menjadi alasan, bagaimana seharusnya dilaksanakan, penulis menguraikannya secara lebih terinci.

Sejalan dengan tulisan kedua, BABARI dalam tulisannya yang berjudul "Latihan Ketrampilan dan Teknik Pengelolaannya" mengetengahkan cara yang perlu ditempuh untuk meningkatkan ketrampilan manusia, khususnya angkatan kerja Indonesia. Peningkatan ketrampilan tersebut dimaksudkan sebagai pelengkap bagi pendidikan formal yang sudah ada agar para angkatan kerja atau calon angkatan kerja dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-78 pada tanggal 20 Mei 1986, pada tempatnyalah kita menelusuri dan mendalami Sejarah Kebangsaan Indonesia yang bermula dari berdirinya Budi Utomo. Dengan melihat, mempelajari ataupun mengadakan refleksi kita akan dapat menarik pelajaran yang bermanfaat dari pengalaman di masa lalu. Hal ini dirasakan sangat penting dan berguna bagi kita yang sedang mengarungi masa kini dan siap-siap mengarungi masa depan. Hal ini dikemukakan oleh Cosmas BATUBARA dalam tulisannya yang berjudul "Relevansi Kebangkitan Nasional."

Sehubungan dengan ini, Medelina KUSHARWANTI dalam tulisannya yang berjudul "Semangat Kebangsaan dan Dinamika Masyarakat" mengemukakan bahwa relevansi dan aktualitas semangat kebangsaan pada masa kini masih terpateri dalam ideologi kebangsaan selain bukti historis yang telah menghantarkan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan hadirnya berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka penghayatan semangat kebangsaan perlu dilakukan secara dinamis dan kreatif.

Dalam masyarakat yang sedang berubah seperti Indonesia, peranan masing-masing individu dan kelompok individu juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut menimbulkan masalah dan sekaligus tantangan. Mengetahui perubahan tersebut secara terinci sangat penting karena hanya dengan cara demikianlah masalahnya dapat dipecahkan secara baik dan bertujuan.

Sehubungan dengan hal ini dua tulisan terakhir, masing-masing "Perubahan Masyarakat: Beberapa Masalah Pergeseran Peranan Para Pemuka Masyarakat" oleh SUKANTO dan "Mobilitas Profesional Muda di Jakarta" yang ditulis oleh Iwan P. HUTAJULU, menyoroti perubahan yang dimaksudkan dari berbagai aspek. Sukanto dalam tulisannya secara terinci menguraikan perubahan pengaruh dari pemuka masyarakat ditinjau menurut periodenya dan Iwan P. Hutajulu menyoroti mobilitas profesional muda khususnya yang berada di Jakarta.

Mei 1986

REDAKS

Pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan yang Mempengaruhinya

Daoed JOESOEF

PENDAHULUAN

Pendidikan bertitik tolak dari pendirian, implisit dan eksplisit, bahwa manusia tidak dengan sendirinya dapat menjadi orang yang didambakan, baik yang didambakan oleh dirinya sendiri, oleh orang tua dan keluarganya, maupun oleh masyarakat, bangsa dan negara. Memang ada tokoh-tokoh pemikir yang tidak berpendirian seperti ini. Charles Robert Darwin, misalnya, menyimpulkan "the Origin of Species" dengan kalimat, "... And as natural selection works solely by and for the good of each being, all corporeal and mental environments will tend to progress towards perfection". Dengan nada yang sama Herbert Spencer berpendapat bahwa, "the ultimate development of the ideal man is logically certain". Optimisme eskatologikal seperti ini kiranya dihayati pula oleh Alfred Tennyson ketika menyatakan tentang "... one far off divine toward which the whole creation moves".

Namun lenyapnya jenis-jenis tertentu dari makhluk yang pernah ada di bumi serta dekadensi manusia serta kebudayaannya, mengingatkan kita bahwa makhluk, termasuk manusia, tidak dengan sendirinya berkembang menjadi baik dan sempurna seperti yang diharapkan dan diduga itu. Selalu terlihat adanya penyimpangan ke arah yang buruk atau merusak yang begitu rupa sehingga diperlukan adanya campur tangan manusia yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa tuntunan, bimbingan, latihan, petunjuk dan ajaran, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman masa lalu atau yang dirumuskan melalui penalaran dan pemikiran reflektif. Campur tangan manusia pada perkembangan alamiah tersebut ini lazimnya disebut sebagai "pendidikan".

Jadi dengan bertitik tolak dari pendirian bahwa manusia tidak dengan sendirinya dapat menjadi orang seperti yang didambakan, pendidikan pada asas-

nya berusaha membimbing dan membantu -- walaupun tidak memperbaiki, mengoreksi atau mengubah -- tingkah-laku manusia supaya dapat menjadi seperti yang didambakan itu. Sebab, walaupun telah disediakan buku, tidak dengan sendirinya anak didik mau membaca sampai tuntas. Walaupun telah disediakan perpustakaan, tidak dengan sendirinya mahasiswa berusaha memanfaatkannya secara optimum. Maka diperlukan adanya tindakan dan ketentuan yang mendorong anak didik untuk bertingkah-laku yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan kebudayaannya, tindakan dan ketentuan yang tanpa menimbulkan akibat sampingan yang merusak dan dapat menggerakkan tingkah-laku yang mencerminkan "penghargaan terhadap belajar".

Bahwa manusia termasuk makhluk yang terus-menerus berpikir, sudah menjadi pengetahuan umum. Yang kiranya kurang disadari adalah kenyataan bahwa keseluruhan sejarah manusia akan dapat dipahami sepenuhnya bila ia ditanggapi sebagai suatu proses belajar-mengajar. Sebab dengan belajar-mengajar itu manusia tidak lagi merupakan makhluk binatang dan menjadi makhluk manusia. Sedangkan belajar-mengajar adalah tingkah-laku. Kecerdasan dan ilmu pengetahuan itu sendiri juga adalah tingkah-laku. Namun lawan dari kecerdasan dan kebalikan dari ilmu pengetahuan, yaitu kebodohan dan takhyul, adalah juga tingkah-laku.

Kegiatan artistik, kesibukan kebudayaan dan produktivitas ilmiah selalu kali dikaitkan dengan kesantiaian (leisure). Memang diperlukan banyak waktu untuk dapat melakukan sebaik-baiknya semua kegiatan tersebut. Namun banyaknya waktu yang tersedia tidak dengan sendirinya menggerakkan seni, mengembangkan budaya dan menyempurnakan ilmu pengetahuan. Untuk semua ini, di samping waktu, diperlukan adanya kondisi khusus berupa tindakan dan ketentuan, yang dapat mendorong manusia untuk bertingkah-laku yang tepat dan bijaksana dalam menggunakan waktu yang tersedia itu. Sedangkan tujuan pendidikan (proses belajar-mengajar) pada umumnya adalah justru, menurut Aristoteles, penggunaan yang bijaksana dari waktu yang tersedia itu.

Bila membimbing, mengatur dan memperbaiki tingkah-laku manusia merupakan tugas implisit dari pendidikan, soalnya lalu bagaimana caranya? Caranya adalah menata atau mempengaruhi faktor-faktor atau hal-hal yang menggerakkan tingkah-laku manusia tersebut. Dengan perkataan lain, dengan jalan mempengaruhi "sebab-sebab" dari tingkah-laku manusia.

I. FAKTOR KEJIWAAN DAN TINGKAH-LAKU MANUSIA

Kesadaran manusia tentang adanya "sebab-sebab" tersebut kiranya datang dari pengalaman (tingkah-laku)-nya sendiri, yaitu: ada benda bergerak karena

dia yang menggerakkannya. Maka bila ada sesuatu yang bergerak tentu ada yang menggerakkannya. Yang menggerakkan itu adakalanya dapat dilihat tetapi adakalanya pula tidak kelihatan karena memang tidak dapat dilihat. Orang Yunani purba menganggap dewa-dewa sebagai penyebab (yang tidak kelihatan) dari gejala-gejala fisik yang kelihatan. Dewa-dewa ini biasanya berada di luar benda-benda yang mereka gerakkan tetapi adakalanya mereka ini masuk ke dalam benda tersebut dan lalu memiliki serta menguasainya. Orang primitif menyebut dewa tersebut sebagai "roh", "jin", "begu", "hantu" atau "semangat"

Orang terdidik masa kini tidak percaya lagi pada sebutan-sebutan seperti itu tetapi masih tetap menganggap bahwa tingkah-laku manusia disebabkan oleh sesuatu yang tidak kelihatan berada dalam diri manusia itu sendiri, "indwelling agents" atau "inner man". Psikoanalisis menamakannya sebagai "personalitas", dan tidak hanya satu, melainkan tiga, yaitu "ego", "super-ego" dan "id". Ketiga personalitas tersebut beserta interaksi antara ketiganya itulah yang menggerakkan dan mempengaruhi tingkah-laku manusia dengan cara yang berbeda pada waktu yang berlainan. Psikologi fisiologikal membicarakan hal-hal yang non-fisik tersebut sebagai "keadaan mental" (states of mind), "perasaan", berupa pikiran, gagasan, maksud, tujuan, rencana, keputusan, tekad, ketegangan, nilai-nilai, dan lain-lain, yang dapat menggerakkan perubahan-perubahan fisik di dalam dunia fisik.

Jadi ada anggapan bahwa hal yang non-fisik (mind) menggerakkan unsur fisik (body). Dengan perkataan lain, tingkah-laku manusia dijelaskan melalui keadaan mental yang menggerakkan itu. Inilah kiranya yang menjadi pegangan (thesis) dari ilmu tingkah-laku manusia (behavioral sciences). Ilmu pengetahuan ini terus-menerus menelusuri tingkah-laku manusia sampai ke keadaan mental, perasaan, karakter, sifat manusia, dan lain-lain. Namun ilmu tentang tingkah-laku ini agak lambat perkembangannya karena sebagian faktor penjelasannya adakalanya seperti langsung dapat diamati sedangkan sebagian lainnya sungguh sulit untuk diketemukan.

Betapa tidak. Kalau gerakan badaniah dianggap sebagai digerakkan oleh keadaan mental atau kejiwaan, maka untuk dapat mengarahkan gerakan badaniah tersebut seharusnya kita pengaruh keadaan mental yang menggerakkannya. Untuk mempengaruhi hal yang non-fisik ini, pada gilirannya, kita harus mengetahui asal-usulnya. Sebenarnya dahulu pun orang pernah mempertanyakan dari mana datangnya hal-hal yang non-fisik itu? Terhadap pertanyaan ini orang Yunani purba telah siap dengan jawabannya, yaitu: "dari dewa!" Seseorang yang bertingkah-laku kegila-gilaan disebabkan oleh nafsu yang dimasukkan ke dalam dadanya oleh dewa yang membencinya. Se-

baliknya dewa yang merestui seorang pejuang akan memberikan tambahan semangat kepadanya sehingga ia mampu bertempur dengan gagah berani. Aristoteles berpikir bahwa ada sifat "ketuhanan" dalam pikiran manusia, sedangkan Zeno menganggap bahwa intelek itu sendiri adalah Tuhan.

Penjelasan seperti ini tentu sulit diterima oleh penalaran ilmiah karena dengan demikian fungsi "keadaan mental" yang seharusnya memberikan penjelasan menjadi tidak jelas karena ia tidak dijelaskan lagi. Penjelasan berhenti setibanya di keadaan mental itu. Jadi ia bukan merupakan mediator antara apa yang telah terjadi dengan tingkah-laku yang sedang dibuat, ia menjadi pusat (sumber) yang melahirkan dan membuat tingkah-laku. Ia menggerakkan, mencetuskan dan menciptakan dan dalam melakukan semua ini, ia tetap merupakan suatu misteri dan -- dalam anggapan orang Yunani purba -- ia merupakan sesuatu yang bersifat kudus (divine atau Ilahiah). Keadaan seperti ini tentu sulit untuk dibiarkan karena "keadaan mental" atau "inner man" ini seperti dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang orang belum mampu menjelaskannya dengan cara-cara lain.

Maka analisa ilmiah tetap diminta untuk mencari cara yang lain ini, yaitu diminta untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara tingkah-laku seseorang sebagai suatu sistem fisik dengan kondisi yang meliputi kehidupan dan perkembangan orang yang bersangkutan. Dengan begini titik perhatian beralih dari penjelasan mentalistik ke pengaruh lingkungan eksternal atas tingkah-laku manusia.

II. FAKTOR LINGKUNGAN DAN TINGKAH-LAKU MANUSIA

Sebelum abad ke sembilan belas orang menganggap lingkungan semata-mata sebagai suatu ruang lingkup yang pasif di mana lahir berbagai jenis organisme yang berbeda, lalu berkembang biak di situ dan kemudian mati. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa lingkungan ini sebenarnya bertanggung jawab atas kenyataan tentang kehadiran begitu banyak jenis yang berbeda satu dengan lainnya. Kelambatan timbulnya kesadaran ini kiranya disebabkan oleh cara bekerja lingkungan itu sendiri, yaitu: biasa-biasa saja, tidak menyolok, tidak mendorong, tidak menarik, tetapi dengan diam-diam mengadakan seleksi, membuat pilihan, memilih. Selama empat ribu tahun dalam sejarah pemikiran manusiawi proses seleksi alamiah ini berjalan tanpa disadari oleh manusia, luput dari perhatian manusia, padahal dampak yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Ketika akhirnya manusia menyadari hal ini, ia segera dijadikan kunci dari teori evolusi. Peranan seleksi alamiah dalam proses evolusi baru dirumuskan kira-kira seratus tahun yang lalu, sedangkan peranan selektif dari lingkungan dalam pembentukan dan penerusan tingkah-

laku manusia baru mulai diakui dan dipelajari. Dengan dipahaminya interaksi antara organisme dengan lingkungannya, hal-hal yang dahulu dianggap merupakan akibat dari keadaan mental, perasaan, sifat dan tabiat yang tertutup untuk penjelasan lebih lanjut, kini ditelusuri hingga ke sebab-sebab yang dikondisikan oleh lingkungan dan terbuka untuk penjelasan selanjutnya.

Dipandang dari sudut pendidikan yang pada dasarnya berusaha membina, bila perlu mengubah, tingkah-laku manusia supaya dapat menjadi seperti yang didambakan, pendekatan lingkungan terhadap tingkah-laku manusia lebih bermanfaat ketimbang pendekatan keadaan mental. *Pertama*, karena pendekatan lingkungan mengakui tingkah-laku manusia sebagai suatu subjek tersendiri dan tidak hanya sebagai gejala mental. *Kedua*, di antara unsur-unsur keadaan mental ada yang sudah ditetapkan menjadi tujuan dari pendidikan, seperti ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan. Akibatnya semua ini tidak dapat lagi dipakai untuk menjelaskan tingkah-laku manusia. Sebaliknya menjadi semakin menonjol keperluan terhadap usaha pembinaan dan pengoreksian terhadap tingkah-laku manusia, satu dan lain guna dapat membuat manusia yang bertingkah-laku itu menjadi bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan lain-lain. Pembinaan tingkah-laku tersebut dilakukan melalui penataan lingkungan yang mengkondisikan perwujudan tingkah-laku yang didambakan itu, yang dijadikan nilai yang dituju oleh pendidikan. *Ketiga*, menangani masalah lingkungan yang mempengaruhi tingkah-laku manusia relatif lebih terbuka ketimbang menangani keadaan mental yang mempengaruhi tingkah-laku karena sifat keadaan mental yang serba kudus dan tertutup itu; lebih-lebih bila penanganan dan penataan lingkungan itu hendak dilakukan secara ilmiah, teknologikal dan fisikal.

Jadi lingkungan pendidikan merupakan segala dan keseluruhan pengaruh yang diterima oleh setiap manusia sejak lahir dan bukan hanya sejak sekolah. Memang proses pendidikan, demi keberhasilannya, menuntut supaya lingkungan yang meliputi dan mengitarinya ditata dan tidak dibiarkan berjalan liar sekehendak sendiri. Manusia itu sendiri, tanpa disadarinya, tidak pernah hidup dalam suatu kekosongan. Ia terus-menerus, dari sejak lahir sampai mati, berada dalam berbagai jenis dan lapisan lingkungan, dari mulai yang terkecil, rumah tangganya sendiri, sampai ke yang terbesar, masyarakat dunia (berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi). Setiap lingkungan, dengan caranya masing-masing, dan dengan intensitas yang berbeda, berpengaruh atas (perkembangan) dirinya.

Lingkungan yang terbesar dan langsung mempengaruhi jalannya pendidikan pada umumnya adalah masyarakat nasional. Dari berbagai ungkapan yang dilontarkan oleh beberapa anggota masyarakat, termasuk yang cukup

terdidik, ada kesan betapa kaburnya pandangan mereka tentang peran dan keadaan lingkungan terbesar ini. Ada dikatakan, misalnya, kehidupan di Inggris tertib, tegas tetapi sopan, dan ada kebanggaan berbangsa. Karenanya sekolah menengah di Inggris sungguh terpuji berhubung dari situlah tumbuh dan berkembang kehidupan Inggris yang beradab itu. Ada dikatakan bahwa ilmu pengetahuan Jerman dan Amerika luar biasa. Karenanya perguruan tinggi di kedua negeri tersebut pantas dijadikan contoh berhubung di situlah sumber keluarbiasaan itu. Berhubung dengan itu marilah kita tiru sekolah menengah Inggris dan perguruan tinggi Jerman serta Amerika.

Memang benar bahwa sekolah menengah Inggris baik dan perguruan tinggi Jerman serta Amerika hebat. Namun keliru untuk berpendapat bahwa kita harus mencontohnya, bahwa kita harus membuat persis seperti itu di Indonesia. Pendapat tersebut keliru karena menganggap sesuatu bangsa adalah besar karena lembaga-lembaga pendidikannya, dari yang terendah sampai yang tertinggi, adalah hebat. Pendapat seperti ini menilai sekolah secara berlebihan, memberikan kepada lembaga pendidikan suatu kekuatan yang tidak pernah dimilikinya, bahkan tidak akan dapat dimilikinya, tidak di luar negeri, tidak di mana pun, apalagi di sini. Pendapat ini kiranya merupakan lanjutan, walaupun bukan sisa-sisa, dari idealisme perjuangan di masa penjajahan dahulu. Pada waktu itu, demi pengobaran kegairahan atau penghargaan terhadap sesuatu, dirasa perlu untuk menempatkannya dalam proporsi yang heroik.

Memang benar, bila ada bangsa yang hebat tentu lembaga-lembaga pendidikannya hebat juga. Tidak akan ada bangsa yang hebat tanpa sekolah-sekolah yang hebat. Namun kehebatan ini berlaku juga bagi lembaga dan unsur lainnya dari bangsa yang bersangkutan, seperti mutu kepemimpinannya, ekonominya, keolahragaan, keseniannya, dan lain-lain lagi. Sebab kehebatan sesuatu bangsa adalah tidak lain dari keterpaduan (integrasi) dari semua unsur yang membentuk bangsa itu. Bila sesuatu bangsa brengsek secara politik, baik sistem pendidikan maupun sistem persekolahannya tidak akan menghasilkan apa-apa yang berarti, betapapun baik dan sempurnanya sistem pendidikan dan sistem persekolahan tersebut.

Setiap lembaga pendidikan, bila ia betul-betul merupakan suatu organ fungsional dari bangsanya, akan lebih banyak tergantung pada keseluruhan iklim kebudayaan nasional yang mencakupnya ketimbang pada iklim paedagogikal yang diciptakan secara artifisial di ruang lingkupnya sendiri. Suatu kondisi yang seimbang antara tekanan dari dalam dan dari luar dirinya itu sangat diperlukan supaya kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan menjadi baik. Dengan begini berarti bahwa betapapun hebatnya lembaga pendidikan menengah di Inggris dan lembaga pendidikan tinggi di Jerman dan di

Amerika, semua lembaga ini tidak mungkin dapat dialihpindahkan karena ia hanya merupakan satu bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Totalitas keadaannya merupakan tidak lain dari keseluruhan bangsa yang telah menciptakan dan menghidupinya. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh melihat keadaan persekolahan dan pendidikan di negeri-negeri lain. Boleh saja, tetapi di luar negeri itu yang kita cari adalah informasi dan bukan model untuk dijiplak.

Menyadari betapa kuat dan langsungnya pengaruh lingkungan nasional pada jalannya proses pendidikan berarti menyadari betapa perlunya bangsa kita sebagai keseluruhan menata lingkungan ini sedemikian rupa hingga tidak merusak pendidikan anak-anak kita. Maka itu bukan satu kebetulan kalau selain berlangsung seumur hidup, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan pula bahwa pendidikan dilaksanakan di dalam *lingkungan* rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Memang pendidikan, sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya dari manusia, terjadi tidak dalam suatu kekosongan tetapi di dalam dan di tengah-tengah suatu lingkungan tertentu. Baik disengaja ataupun tidak, lingkungan ini turut mempengaruhi pendidikan. Karenanya lingkungan ini perlu diperhatikan, bahkan dibina, sehingga menjadi satu lingkungan yang bermanfaat (*condusive*) bagi perkembangan pendidikan, termasuk lingkungan sekolah. Istilah lingkungan di sini hendaknya tidak ditanggapi semata-mata dalam arti fisik-lokasi, tetapi lebih banyak dalam arti suasana kondisional dari proses belajar-mengajar di sekolah yang bersangkutan.

Untuk ini pada tingkat pertama dan terakhir dituntut adanya satu komitmen politik, yang dari semenjak Agustus 1945 sampai sekarang ini belum pernah ada secara tuntas, walaupun beberapa pasal UUD 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk itu. Pendidikan itu sendiri tidak berdaya untuk menata lingkungan nasional yang begitu menentukan keberhasilan kerjanya. Tidak adanya lingkungan nasional yang betul-betul dapat diandalkan oleh proses pendidikan kita ini sungguh merupakan satu hambatan yang serius bagi kelancaran, jangkauan keberhasilan, pembinaan tingkah-laku anak-anak didik seperti yang diharapkan dan didambakan.

Lingkungan lain yang juga sangat menentukan tingkah-laku anak-anak adalah keluarga atau rumah tangga. Lingkungan ini pun sulit untuk dijangkau oleh lembaga pendidikan formal. Seingat saya, di zaman penjajahan Belanda dahulu ada beberapa lembaga pendidikan yang benar-benar berusaha menjangkau dan membina lingkungan rumah tangga (keluarga) dari anak didik mereka melalui sebuah bulanan yang dikeluarkannya, bernama "Het Ouder's Blad". Setahu saya hasil usaha ini dapat dikatakan lumayan, karena sedikitnya melalui majalah ini terdapat kontak mental-ideal antara sekolah dengan

keluarga anak didik, antara guru pendidik dengan orang tua murid. Berhubung dengan itu usaha seperti ini saya kira pantas untuk dilakukan dewasa ini. Lebih-lebih bila diingat bahwa masalah-masalah yang kini dihadapi oleh sekolah, anak didik dan orang tua yang menyangkut pendidikan dewasa ini jauh lebih kompleks dari yang dahulu kita hadapi di zaman penjajahan.

Betapa parahnya sekarang keadaan lingkungan rumah tangga ini, terutama di sektor perkotaan. Walaupun tempat kediaman sudah berbentuk gedung mewah, bangunan fisik rumah ini tidak berfungsi sebagai "rumah tangga" (home) yang ideal. Hal ini untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa rumah gedung memang dapat dibeli dengan meningkatnya pendapatan tetapi "rumah tangga" yang baik tidak mungkin dapat dibeli karena ia harus dibangun oleh penghuninya sendiri secara bersama-sama berdasarkan pengertian dan kesadaran familial yang mendalam.

Dari orang tua yang tidak terdidik memang sulit diharapkan dapat membina rumah tangganya menjadi lingkungan yang "condisive" untuk pendidikan anak. Celakanya dari orang tua yang terpelajar juga tidak semuanya dapat diandalkan. Sebagian besar dari mereka kiranya tidak mempunyai pengertian yang tepat tentang peranan mereka dalam pendidikan anaknya sendiri. Mereka ini menganggap tugasnya sudah selesai dengan keberhasilannya mendapatkan tempat bagi anaknya di sesuatu sekolah dan kemudian memberikannya uang saku sebanyak mungkin. Maka itu perhatian mereka pada pendidikan anaknya, walaupun ada, hanya menjelang permulaan tahun pelajaran. Mereka akan berbuat apa saja asalkan anaknya dapat tempat di sekolah, kalau perlu dengan menangis di muka kepala sekolah atau menyogoknya dengan uang atau mengancamnya secara halus atau terang-terangan. Mereka lupa bahwa pendidikan anak yang teratur berjalan setiap detik sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun dan karenanya lupa pula membina keseluruhan gedung kediamannya menjadi satu "rumah tangga" (home), menjadi satu lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Kelalaian orang tua mengenai tugas kependidikannya ini untuk sebagian besar adalah akibat kepicikan pandangan politik dari pemimpin masyarakat kita. Mereka menuntut supaya pendidikan formal semakin lama semakin banyak mengambil-alih tugas-tugas kependidikan yang sebenarnya secara esensial merupakan tugas yang khas dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Lingkungan yang seharusnya dapat ditata dan dibina sendiri oleh lembaga pendidikan adalah lingkungannya sendiri, yaitu lingkungan sekolah. Pembinaan yang baik dari lingkungan sekolah ini menjadi semakin mendesak mengingat ia harus dapat mengimbangi akibat destruktif pada tingkah-laku anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan masyarakat yang berkembang secara liar dan lingkungan rumah tangga (keluarga) yang tidak peduli (indifferent)

terhadap pendidikan. Belum diperhitungkan lagi lingkungan-lingkungan kecil lainnya yang juga mencakup kehidupan dan gerak langkah anak-anak, tetapi yang belum tertata sebagaimana seharusnya (organisasi-organisasi kepramukaan, keolahragaan, kepemudaan, politik, keagamaan, dan lain-lain).

Pembinaan lingkungan sekolah ini dahulu telah saya mulai berdasarkan suatu pikiran konseptual yang cukup terpadu dengan konsep pembaharuan pendidikan nasional. Untuk jenjang pendidikan SLTA ke bawah lingkungan tersebut disebut "Pusat Kebudayaan", dalam artian "Pusat dari Nilai-Nilai" (karena kebudayaan per definisi adalah sistem nilai yang kita hayati). Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan yang saya kembangkan ketika itu, yaitu sebagai proses belajar-mengajar untuk membantu anak didik dari mulai menggali sampai mengamalkan semua nilai yang kita puji sebagai baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Untuk perguruan tinggi, lingkungannya disebut sebagai "Masyarakat Ilmiah", sejalan dengan pikiran konseptual tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Bila di jenjang-jenjang pendidikan di bawahnya semua nilai yang dianggap baik dikembangkan demi pembinaan tingkah-laku anak didik, di jenjang pendidikan tinggi -- tanpa mengabaikan semua nilai-nilai tersebut -- salah satu dari nilai-nilai ini, yaitu ilmu pengetahuan, dengan sadar dan sengaja diutamakan. Hal ini mengingat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini negara-bangsa kita betul-betul tertinggal jauh di belakang, sedangkan pendidikan tinggi merupakan satu-satunya jenjang pendidikan formal di mana anak didik terakhir kalinya dilatih untuk menguasai ilmu pengetahuan itu. Masih banyak alasan lainnya lagi, namun mengenai hal-hal tersebut dahulu telah banyak saya tulis dan uraikan dalam berbagai kesempatan, sehingga kali ini saya kira tidak perlu diulangi lagi.

III. SEKOLAH SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN

Lingkungan pendidikan di perguruan tinggi tidak akan dibahas di sini, betapa pun pentingnya hal itu, mengingat ruangan yang terbatas. Yang akan diajukan secara garis besar di bagian tulisan ini sekarang adalah lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah mulai Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).

Pusat kebudayaan adalah pola lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah jenjang pendidikan tinggi. Kebudayaan adalah sistem nilai dan gagasan (idee) vital yang kita hayati.

Istilah nilai mengandung dua pengertian pokok. *Pertama*, ia berhubungan dengan standar nilai atau asas penilaian. Segala sesuatu yang kita pegang se-

bagai ukuran atau dasar menilai sesuatu dalam kehidupan ini, seperti dasar penilaian buruk atau baik, penting atau tidak penting, adalah nilai; dan karena ia adalah nilai maka ia adalah kebudayaan berhubungan kebudayaan, seperti telah dikatakan di atas, adalah sistem nilai. Maka itu sering disebut bahwa kebudayaan bersifat normatif atau preskriptif. *Kedua*, istilah nilai berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap "bernilai" itu sendiri. Yang bernilai ini dapat berwujud benda material dan karenanya dapat dijamah, seperti warisan budaya berupa candi, rumah adat, mesjid kuno, benteng kuno dan lain-lain. Ia dapat pula berupa hal-hal yang non-material, tidak berbentuk benda dan karenanya tidak mungkin dijamah (intangible), seperti norma, tradisi, adat-istiadat, tingkah-laku yang membiasa (kebiasaan), disiplin, ilmu pengetahuan, semangat kemerdekaan, dan lain-lain. Maka manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, menunjukkan penghargaan yang tinggi pada sesuatu yang bernilai ini sebagaimana terbukti dari preferensi repetitif terhadap benda atau hal tersebut.

Maka pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan adalah proses belajar-mengajar untuk membantu anak didik menggali, menemui, mempelajari, mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan semua nilai yang kita puji sebagai baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi pendidikan dalam dirinya merupakan sarana penerusan nilai-nilai dan gagasan vital yang kita hayati.

Maka dengan sekolah sebagai pusat kebudayaan dimaksudkan, per definisi, sekolah sebagai pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta perlu dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat dan negara-bangsa. Karenanya dianggap perlu agar dibiasakan kepada anak didik untuk sedini mungkin dari mulai menggalinya sampai mengamalkannya melalui proses belajar-mengajar di sekolah. Paling sedikitnya sekolah sebagai wadah utama untuk mengembangkan nilai-nilai yang begitu penting karena sangat menentukan bagi kemajuan dan peradaban manusia, yaitu logika, etika, estetika dan praktika (ramuan dari ketiga nilai yang disebut pertama itu). Dengan mengembangkan perwujudan keempat nilai anak didik terbantu untuk menguasai pengetahuan, mampu mengadakan pilihan-pilihan (hidup) serta sanggup berkomunikasi secara tepat sehingga tumbuh manusia pembangunan yang bertanggung jawab, terbentuk manusia Indonesia seutuhnya dan dapat mewujudkan peradaban bangsa yang tinggi dan luhur.

Dengan demikian suatu sekolah dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan, apabila sekolah itu telah mampu menciptakan dirinya sebagai masyarakat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas di sekitarnya dan mampu membentuk manusia pembangunan, manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah itu sendiri.

Lingkungan sekolah yang berupa pusat kebudayaan itu seharusnya dalam bentuk sarana serta prasarana pendidikan dan berupa kegiatan-kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang perlu disediakan dalam mengembangkan sekolah sebagai pusat kebudayaan, antara lain, berwujud:

- (a) Ruang belajar,
- (b) Ruang perpustakaan,
- (c) Ruang laboratorium,
- (d) Ruang ketrampilan/praktek,
- (e) Ruang kesenian,
- (f) Ruang/tempat olahraga,
- (g) Ruang kepala sekolah,
- (h) Ruang guru,
- (i) Ruang usaha kesehatan sekolah,
- (j) Ruang membersihkan badan dan kamar kecil (W.C.) yang bersih,
- (k) Lain-lain fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar dan yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak didik, terlepas dari asal-usul keluarga, kedaerahan dan pandangan/keyakinan keagamaan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah kegiatan-kegiatan terpuji yang harus dibiasakan begitu rupa sehingga menjadi bagian budi pekerti (*tweede natuur*) dari anak didik sehari-hari sepanjang hidupnya kelak. Kegiatan-kegiatan itu, pada pokoknya, adalah:

- (a) Pengembangan logika (semangat ilmiah):
 - (1) Membaca (dari mulai gemar, butuh, sampai biasa membaca),
 - (2) Rajin dan tekun belajar,
 - (3) Suka meneliti (tidak menerima sesuatu begitu saja apa adanya),
 - (4) Gairah menulis analitik,
- (b) Pengembangan etika:
 - (1) Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
 - (2) Bermoral Pancasila (menghayati dan mengamalkannya),
 - (3) Bersikap dengan tingkah-laku yang terpuji,
 - (4) Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar (*correct*),
 - (5) Berdisiplin;
- (c) Pengembangan estetika:
 - (1) Apresiasi seni (menghargai kesenian),
 - (2) Persepsi seni (dapat menikmati kesenian),
 - (3) Kreasi seni (dapat menciptakan karya baru);

(d) Pengembangan praktika (gabungan a, b, dan c):

- (1) Menghargai pekerjaan fisik di samping pekerjaan intelektual,
- (2) Terampil dan cekatan,
- (3) Bergairah pada teknikalitas dan teknologi.

Agar pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan dapat sejauh mungkin berhasil haruslah diwujudkan suatu ketahanan sekolah yang mantap di samping penyediaan sarana serta prasarana dan pengembangan berbagai kegiatan terpuji sebagaimana tersebut di atas. Betapa tidak!

Kebudayaan adalah sistem nilai dan gagasan vital yang kita hayati. Pendidikan, sebagai bagian yang integral dari kebudayaan, adalah proses belajar-mengajar guna meneruskan kepada generasi penerus nilai-nilai yang dihayati itu. Sejauh proses penerusan nilai-nilai ini dilaksanakan di lingkungan sekolah maka diperlukan di lingkungan itu adanya suasana dan kondisi yang memungkinkan kelancaran bagi proses pengenalan dan penghayatan nilai-nilai tersebut.

Apabila kelancaran ini memang ada berhubung adanya ketenteraman dan keamanan maka situasi begini memberikan rasa kepastian (sekuriti) yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa kepuasan. Puas karena kebutuhan belajar, kebutuhan menghayati nilai-nilai, dapat dipenuhi. Jadi sekuriti di sini secara esensial merupakan satu kondisi psikologikal, suatu perasaan. Dengan perkataan lain, dalam konteks ini, sekuriti berupa perasaan yang mengiringi pemuasan nilai-nilai atau yang timbul setelah mendapatkan kepastian bahwa pemuasan tersebut mungkin terlaksana secara layak.

Jadi sekuriti tidak akan ada apabila tidak ada kemungkinan bahwa hasrat belajar-mengajar dapat dipuaskan berhubung lingkungan sekolah tidak tenteram, tidak aman, tidak bebas dari gangguan, jadi tidak memungkinkan. Maka demi adanya sekuriti diperlukan adanya ketahanan sekolah sebagai unsur mutlak dari lingkungan sekolah yang baik, sebagai komponen dari pola sekolah sebagai pusat kebudayaan.

Maka yang dimaksudkan dengan ketahanan sekolah adalah kondisi dinamik, baik kondisi fisik maupun mental-spiritual, yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, gangguan dan hambatan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar sekolah yang langsung atau tidak langsung mengganggu proses belajar-mengajar dalam rangka penerusan, pengenalan, pemahaman, penguasaan, penghayatan dan penerapan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan diri pribadi, masyarakat dan bangsa. Dengan perkataan lain, suatu sekolah memiliki ketahanan sekolah yang mantap, apabila sekolah itu memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk:

melakukan proses belajar-mengajar dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa; menghadapi tantangan dan hambatan serta gangguan apa pun, baik langsung, maupun tidak langsung, dari mana pun datangnya.

Untuk mewujudkan ketahanan sekolah yang mantap diperlukan sekali adanya serangkaian perhatian dan pembinaan di pihak penyelenggara dan penanggung jawab sekolah (pimpinan, pelaksana, guru dan pegawai administratif lainnya). Adapun rangkaian perhatian dan pembinaan tersebut, pada pokoknya, adalah:

- a) Disiplin
- b) Ketertiban sekolah
- c) Wibawa kepala sekolah dan guru, terutama wali kelas (dalam hal perguruan tinggi: Rektor, Dekan dan Dosen, terutama Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III)
- d) Proses belajar-mengajar yang baik dan intensif
- e) Upacara bendera
- f) Senam pagi
- g) Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan (5-K)
- h) Pelaksanaan dua belas langkah kepemimpinan:
 1. tahu tugas pokok sendiri,
 2. tahu jumlah pembantunya,
 3. tahu nama-nama pembantunya,
 4. tahu tugas masing-masing pembantunya,
 5. memperhatikan kehadiran pembantunya,
 6. memperhatikan peralatan kerja pembantunya,
 7. menilai pembantunya secara periodik,
 8. mengambil tindakan/keputusan yang diperlukan,
 9. memperhatikan karier pembantunya,
 10. memperhatikan kesejahteraan,
 11. menciptakan suasana kekeluargaan, dan
 12. memberikan laporan yang benar.

PENUTUP

Yang kiranya perlu kita sadari bersama adalah bahwa dengan dikaitkannya tingkah laku anak didik pada lingkungan dari lembaga di mana ia dididik secara formal, maka semua fungsi yang dahulu dianggap wewenang sepenuhnya

nya dari keadaan mental atau kejiwaan anak didik, kini satu per satu dialihkan kepada (tanggung jawab) lingkungan pendidikannya. Berhubung dengan itu lingkungan ini perlu dibina dan ditata begitu rupa sehingga dapat mempengaruhi anak didik dalam bertingkah-laku sesuai dengan yang kita harapkan dan pujikan. Untuk keperluan pembinaan dan penataan itu perlu dirumuskan suatu "teknologi tingkah-laku" yang diramu dari berbagai nilai kehidupan dan ketentuan serta teknikalitas penataan dan pembinaan lingkungan. Nilai-nilai (kehidupan) tersebut secara esensial berkaitan dengan standar atau asas penilaian bagi kebebasan bergerak (bertingkah-laku) yang bertanggung jawab, bagi pujian dan penghargaan serta bagi teguran dan hukuman.

Lingkungan sekolah perlu dibina mengingat kehadiran sekolah di setiap masyarakat adalah untuk menjamin pemasyarakatan kedua bagi anak-anak. Artinya, sekolah adalah tempat di mana anak-anak untuk pertama kalinya bertemu dan berkenalan, dengan skala yang cukup besar, organisasi formal yang mencerminkan kedewasaan hidup maupun bentuk, jenis dan intensitas hubungan-hubungan yang jauh melampaui apa yang selama ini dialaminya di dalam keluarga dan kelompok kecil tetangga serta kenalannya. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak juga diajarkan dan mempelajari keterampilan formal serta pengetahuan yang diperlukannya guna dapat melaksanakan peranannya kelak sebagai orang dewasa di tengah-tengah suatu masyarakat modern.

Akhirnya sekolah sebagai pusat kebudayaan perlu dibina perwujudannya begitu rupa sehingga masyarakat di sekitar sekolah dapat turut merasakan dan menghayati sinar kemajuan yang dipancarkannya dan kemudian mencontoh segala sesuatu yang baik itu dalam kehidupan mereka. Jadi melalui pola lingkungan seperti yang diharapkan ini, sekolah dapat menjadi tempat kegiatan utama dalam pembaharuan pembangunan dan pengembangan masyarakat selanjutnya.

Dengan demikian suatu sekolah dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan, apabila sekolah itu telah mampu menciptakan masyarakat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, sanggup mengelakkan dan menumpas segala gangguan belajar, baik yang datang dari dalam lingkungannya sendiri maupun yang datang dari luar, dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat di sekitarnya dan mampu membentuk manusia pembangunan, manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah itu sendiri.

Pendidikan dalam Dunia Usaha

Ronald NANGOI

Rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas organisasi perusahaan yang banyak disoroti dewasa ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan organisasi di bidang manajerial dan ketenagakerjaan. Manajemen perusahaan di Indonesia umumnya masih sangat rapuh,¹ terutama karena tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga manajer profesional dan tenaga-tenaga kerja trampil. Banyak perusahaan merekrut tenaga kerja yang kurang trampil dan bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.

Pendekatan yang paling efektif dan tetap perlu dilakukan perusahaan adalah investasi sumber daya manusia (human investment) melalui program-program pendidikan manajerial dan teknis yang ada dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini mempercepat proses profesionalisme kerja dan juga senantiasa memberi nilai tambah bagi sumber daya manusia sehingga bisa mengelola sumber-sumber daya perusahaan lainnya secara lebih efektif dan efisien.

Namun demikian pendekatan di bidang pendidikan tidak begitu mudah. Tidak jarang perusahaan melihatnya sebagai biaya daripada sebagai suatu bentuk investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Ini antara lain tercermin dari sikap sebagian perusahaan untuk lebih senang menikmati hasil pendidikan melalui pembajakan tanpa mengeluarkan biaya.²

¹Lihat harian *Kompas*, 18 November 1985.

²Djisman S. Simandjuntak, "Model-model Pembangunan dan Kenyataan Kebijakan Ekonomi," *Analisa*, Tahun XIV (No. 12, Desember 1985).

KELANGKAAN TENAGA KERJA PROFESIONAL

Kelangkaan tenaga profesional dan trampil sering dilihat sebagai dampak dari kelemahan sistem pendidikan nasional. Masalah ini sama buruknya dengan masalah pengangguran yang keduanya dinilai bisa terjadi karena kurang tanggapnya atau pekanya pihak penyelenggara pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat industri.

Dunia usaha pun cenderung mempersalahkan dunia pendidikan karena belum berhasil memenuhi kebutuhannya secara penuh. Perusahaan-perusahaan dikecewakan karena seolah-olah harus turut menerima "getah" dari kelemahan sistem pendidikan berupa penempatan tenaga kerja yang kurang trampil. Prijono mengemukakan bahwa lebih dari 50% seluruh tenaga kerja yang ada dan telah bekerja pada berbagai jenis usaha khususnya untuk pekerja tingkat bawah ternyata belum menamatkan SD dan bahkan banyak yang tidak bersekolah sama sekali.³ Dan tidak jarang sektor industri terutama yang menggunakan teknologi madya apalagi teknologi canggih untuk menggunakan tenaga asing,⁴ karena langkanya tenaga trampil teknis menengah.

Walaupun sistem pendidikan nasional tetap tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, tidak ada salahnya bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan pendidikan daripada sekedar mencari kelemahan dalam sistem pendidikan. Konsensus nasional bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat menunjukkan relevansinya partisipasi swasta di bidang pendidikan.

Perusahaan-perusahaan yang maju kiranya bisa menyumbangkan diri dalam bidang pendidikan ketrampilan atau kejuruan tertentu yang belum terjangkau atau penyelenggaraannya terbatas oleh pendidikan formal. Selain mungkin bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal, perusahaan-perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan latihan sendiri dan terbuka untuk umum. Misalnya, perusahaan-perusahaan otomotif dapat menyelenggarakan pusat-pusat latihan ketrampilan di bidang perbengkelan dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi menyelenggarakan pendidikan ketrampilan pengecoran beton, dan lain sebagainya. Partisipasi di bidang pendidikan teknik dan kejuruan seperti ini antara lain telah ditunjukkan oleh banyak perusahaan komputer dan organisasi perhotelan, meskipun dalam skala terbatas.

³Tjiptoherijanto Prijono, "Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Prisma*, (No. 11/12, November-Desember, 1983).

⁴Djukardi Odang, "Prospek Usaha Dagang di Indonesia," *Analisa*, Tahun XIV (No. 10, Oktober 1985).

Kebutuhan perusahaan akan tenaga pimpinan atau manajer profesional yang membantu pemilik perusahaan untuk mengelola dan memberi arah perkembangan perusahaan sebenarnya juga telah ditanggapi cepat oleh pihak swasta khususnya dunia usaha sendiri. Dalam tahun-tahun terakhir para pengusaha swasta nasional telah mengambil prakarsa untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yakni Institut Manajemen Prasetiya Mulya guna menyelenggarakan pendidikan manajer bertaraf MBA, yang disusul oleh Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan manajemen seperti ini memberi peluang bagi para eksekutif atau calon eksekutif untuk membina dirinya dalam bidang "management know-how."

PENDIDIKAN DI BIDANG MANAJEMEN

Prakarsa di bidang pendidikan manajemen sebenarnya merupakan partisipasi swasta secara konkrit dalam bidang pendidikan. Penyelenggaraannya tidak menyimpang dari sistem pendidikan karena bahkan memenuhi metode pendidikan modern khususnya untuk bidang manajemen. Dalam pendidikan MBA tersebut, para peserta diperlakukan sebagai subyek pendidikan dalam hal mana mereka harus menempatkan diri sebagai pimpinan perusahaan yang harus terus-menerus mengambil keputusan dalam mengelola dan memberikan arah perusahaannya.⁵ Tenaga pengajar lebih berperan sebagai "fasilitator" dalam diskusi-diskusi kasus namun tetap menilai proses belajar para siswa atau peserta dengan mendengar dan menilai mutu presentasi mereka dalam kelas.

Metode kasus lazim dipakai dalam program pendidikannya sebagaimana dilirintis oleh Harvard University Graduate School of Business Administration. Metode kasus diberikan atas dasar keyakinan bahwa para peserta dalam program-program pendidikan dan latihan manajemen dapat secara efisien meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses manajemen dan meningkatkan kompetensi mereka melalui belajar, menekuni dan membahas situasi aktual.⁶

Dalam pendidikan MBA tersebut, para peserta secara khusus tidak dilatih untuk memperdalam teori-teori sampai ke akar-akarnya melainkan dilatih untuk bisa menggunakan teori-teori yang ada dalam menganalisa kasus atau masalah mikro perusahaan, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Para peserta harus menempatkan diri secara sentral sebagai pimpinan perusahaan.

⁵Lihat Kwik Kian Gie, "MBA Indonesia, Apa dan Mengapa," *Kompas*, 20 Januari 1986.

⁶John I. Reynolds, "Case Method in Management Development," (Geneva: International Labour Office, 1980), hal. 1.

Pendekatan seperti ini berbeda dengan program pendidikan tinggi dalam bidang manajemen yang diberikan oleh fakultas-fakultas ekonomi jurusan manajemen, ekonomi atau akuntansi.⁷ Jika para peserta program MBA dilatih untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat teori yang ada dalam menganalisa kasus, mengidentifikasi dan memecahkan masalah perusahaan secara mikro, maka dalam program pendidikan tinggi dalam bidang manajemen oleh fakultas-fakultas ekonomi lebih mengutamakan pendalaman teori.

Metode kasus yang diterapkan dalam pendidikan manajemen ini relevan sekali dengan kebutuhan perusahaan dan karenanya perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak perusahaan. Metode ini sangat populer dalam program-program pendidikan manajemen dan bahkan dalam dasawarsa sekarang, pendidikan dan latihan manajemen lebih menekankan pada analisa masalah riil dan pengambilan keputusan yang riil, pengembangan kelompok kerja dan kesatuan kelompok, pengembangan organisasi, peningkatan pertukaran pengalaman yang relevan dan terutama tanggung jawab individu manajer bagi pengembangan dirinya.⁸

PENDIDIKAN DAN LATIHAN SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN

Walaupun dapat memanfaatkan program-program pendidikan formal di luar perusahaan, manajemen perlu mempertimbangkan juga penyelenggaraan program-program pendidikan dan latihan di dalam perusahaan. Melalui program-program seperti itu, para anggota perusahaan mengalami juga proses sosialisasi yang merupakan pendidikan dalam arti luas agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan sendiri. Dengan memahami aspek-aspek sosial, teknis, dan budaya lingkungan kerja, mereka semakin bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan menerima tanggung jawab yang lebih besar.

Pendekatan ini dilatarbelakangi juga oleh pemikiran bahwa proses pendidikan atau sosialisasi tidak berhenti pada atau menjadi monopoli pendidikan formal dan nonformal, yang semata-mata mempersiapkan seorang individu untuk terjun ke masyarakat. Selama masa kerja, seseorang sebenarnya memasuki suatu proses pendidikan yang sifatnya sebagai penyempurnaan pri-

⁷Kwik Kian Gie telah membahas panjang-lebar perbedaan-perbedaan mendasar program pendidikan manajemen antara lembaga-lembaga pendidikan tersebut sebagai tanggapan terhadap berbagai pendapat mengenai program pendidikan MBA yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia dalam bagian pertama tulisannya di harian *Kompas*, 20 Januari 1986 tersebut.

⁸John I. Reynolds, *op. cit.*, hal., 2.

adanya.⁹ Bahkan proses terakhir ini penting karena menentukan kedudukan seorang individu dalam lingkungan kerja atau masyarakat.

Dalam lingkungan ekonomi yang sulit, banyak perusahaan beroperasi di bawah kapasitas normal sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kelebihan tenaga kerja. Ada perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, tetapi ada juga yang telah mengambil prakarsa untuk melaksanakan program pendidikan ketrampilan untuk mengisi waktu kosong. Tindakan seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan patungan Jepang-Indonesia dalam hal mana rupanya merupakan bagian dari pelaksanaan program gugus kendali mutu (TQC) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja bila keadaan ekonomi telah membaik.

Prakarsa terakhir ini merupakan jalan keluar masalah ketenagakerjaan yang positif pada masa sulit. Akan tetapi sebaiknya pendidikan dan latihan ini tidak bersifat sementara karena menjadi bagian integral dari sistem manajemen perusahaan yang profesional.

Pada dasarnya program pendidikan dan latihan dimulai sejak awal pada saat tenaga kerja direkrut dalam perusahaan. Setiap tenaga kerja pada umumnya belum mampu melakukan tugas sepenuhnya sehingga ia memerlukan masa orientasi kerja, yang tetap merupakan bagian dari pendidikan dan latihan. Selanjutnya manajemen biasanya bisa melakukan latihan dan pendidikan baik melalui pekerjaan sendiri (on the job training) maupun di luar pekerjaan (off the job training). Teknik yang pertama meliputi bimbingan, "coaching," dan juga "job rotation" yang tidak memerlukan biaya yang mahal. Teknik-teknik tersebut kiranya langsung bermanfaat bagi kepentingan produksi dan produktivitas perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi tenaga kerja. Sebab, misalnya job rotation yang merupakan salah satu sistem kerja antara lain bisa menghindari kejenuhan tenaga kerja yang bisa merugikan dirinya dan sebaliknya akan menambah pengetahuan kerja dalam perusahaan.

Program pendidikan dan latihan di luar kerja biasanya menggunakan berbagai teknik seperti perkuliahan, "role playing," studi kasus, simulasi, dan latihan laboratorium. Pemilihan teknik diambil atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti biaya, isi program yang diinginkan, kecocokan fasilitas, kemampuan dan preferensi pelatih maupun yang dilatih, dan prinsip-prinsip belajar.¹⁰

⁹B.J. Habibie, "Industrialisasi, Transformasi, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa," *Prisma*, Tahun XV (No. 1, 1986).

¹⁰William B. Wherther, Jr. dan Keith Davis, *Personnel Management and Human Resources*, (Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 1982), hal. 182.

DUKUNGAN SISTEM MANAJEMEN

Keputusan manajemen untuk mengirim tenaga kerjanya guna mengikuti program pendidikan ketrampilan dan menyelenggarakan program-program pendidikan adalah tepat, tetapi perlu didukung oleh sistem manajemen dan pola kepemimpinan yang efektif, dalam arti mendayagunakan hasil-hasil pendidikan dan latihan dan menyesuaikannya dengan sistem manajemen perusahaan. Tenaga kerja yang terdidik dan profesional akan sulit menjalankan tugas secara efisien apabila tidak diberi tanggung jawab kerja yang jelas sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ketidakjelasan tanggung jawab mungkin sekali disebabkan oleh kelemahan pimpinan untuk menganalisa pekerjaan, baik bidang pekerjaan maupun kemampuan kerja karyawan, dan sistem manajemen yang terlalu berbelit-belit.

Kasus yang cukup menyolok banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan negara. BUMN-BUMN umumnya sering mengikutsertakan tenaga-tenaga kerja yang terpilih dalam program-program pendidikan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum dan kejuruan serta melakukan program-program pendidikan dan latihan yang cukup intensif dan selektif dan bahkan mungkin sekali lebih maju daripada sektor swasta, tetapi mengapa efisiensi kerja mereka sering dipertanyakan dan bahkan akhir-akhir ini diisyukan agar diswastanisasikan. J. Panglaykim menunjukkan bahwa mereka yang menjadi direktur BUMN tergolong orang-orang profesional, tetapi sering tidak efisien karena belum bebasnya mereka dalam menjalankan tugas. Banyak keputusan harus menunggu persetujuan pemerintah.¹¹

Sektor swasta memang diakui lebih efisien daripada pihak perusahaan-perusahaan negara, antara lain karena lebih bebas dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi sebaiknya swasta menghindari kendala-kendala dalam sistem manajemen atau kepemimpinan yang bisa mengganggu pelaksanaan program-program pendidikan (dan latihan). Semakin berkembangnya suatu organisasi akan secara alamiah menciptakan iklim kerja yang birokratis, sehingga mudah menimbulkan ketidakefisienan dalam operasi perusahaan apabila tidak ditanggapi dengan sistem manajemen yang efektif dan dinamis.

Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa program-program pendidikan perlu ditunjang dan disesuaikan dengan sistem promosi di dalam perusahaan. Seringkali lemahnya sistem promosi turut menimbulkan kasus salah penempatan tenaga kerja di mana tenaga yang kurang terdidik untuk meme-

¹¹Lihat *Sinar Harapan*, 31 Maret 1986.

gang jabatan-jabatan pimpinan, dan sebaliknya tenaga-tenaga yang berpendidikan cukup tinggi pada jabatan yang lebih rendah.¹²

Melalui promosi yang jelas, tenaga kerja semakin menerima tanggung jawab yang lebih besar dan dengan demikian semakin terlibat dalam organisasi perusahaan. Lagipula, promosi dan bentuk pertukaran kerja akan meyakinkan tenaga kerja bahwa mereka memiliki karir, dan tidak sekedar kerja. Dengan kata lain, pendidikan dan latihan yang dilakukan dapat bermanfaat secara operasional dalam kegiatan perusahaan karena tenaga kerja yang dihasilkan dapat mengisi lowongan jabatan yang sesuai dengan segala tanggung jawabnya.

PENUTUP

Prakarsa perusahaan untuk memanfaatkan program-program pendidikan manajerial dan teknis jelas didasarkan atas rasa penghargaan yang tinggi terhadap sumber daya manusia. Ia menyadari juga peranan strategis dari manajemen sumber daya manusia dalam operasi perusahaan. Melalui program-program kependidikan, perusahaan akan mempekerjakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki nilai tambah lebih dari segi ketrampilan dan pengetahuan dan karenanya semakin sanggup menerima tanggung jawab kerja yang lebih besar. Tenaga-tenaga kerjanya pun sebaliknya semakin terangsang dalam bekerja karena merasa dipromosi sehingga, dengan dibekali ketrampilan yang tinggi, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi perusahaan.

Dengan demikian, dunia usaha memberi sumbangan yang berharga bagi pengembangan modal sumber daya manusia dalam penciptaan "man-made comparative advantage" yang dirasakan cukup mendesak untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam lingkungan pemasaran yang semakin sulit dan bersifat "global market."

Sebaliknya selama belum melihat pentingnya investasi sumber daya manusia, manajemen tidak akan melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui program-program pendidikan. Dengan demikian, perusahaan tidak memberi prospek kerja yang baik atau menarik bagi tenaga kerja. Malahan

¹²Payaman J. Simandjuntak, "Produktivitas dan Kesempatan Kerja," disunting J. Ravianto dalam *Produktivitas dan Mutu Kehidupan*, (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, 1985), hal. 42.

perusahaan seperti ini tidak menjalankan salah satu fungsi sosialnya dan memperkuat citra bisnis sebagai semata-mata binatang ekonomi yang memperlakukan tenaga kerja sebagai obyek kepentingan dan keuntungan perusahaan. Dan sebagai imbalannya, perusahaan akan senantiasa mempekerjakan karyawan yang kurang terlatih atau produktif dan siap menghadapi perubahan-perubahan dalam lingkungan perusahaan. Keadaan ini tentu tidak dikehendaki baik oleh manajemen perusahaan maupun pihak tenaga kerja karena tidak hanya menyangkut profesionalisme kerja tetapi juga kelangsungan hidup organisasi.

Latihan Ketrampilan dan Teknik Pengelolaannya

BABARI

PENGANTAR

Penduduk yang besar jumlahnya di suatu negara dapat menjadi beban yang berat bagi negara itu tetapi juga dapat menjadi modal utama pembangunan negaranya. Menjadi beban negara apabila penduduk yang besar jumlahnya itu tidak memiliki kualitas tertentu. Sedangkan apabila penduduk suatu negara memiliki suatu kualitas tertentu maka ia akan menjadi modal utama pembangunan negaranya. Kualitas manusia perlu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek dalam diri manusia itu sendiri, dan aspek pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Aspek dalam diri manusia yang perlu didorong dan dikembangkan adalah motivasi dan semangat yang kuat untuk berusaha mengubah hambatan-hambatan yang ada di dalam dirinya dan masyarakatnya menjadi kekuatan-kekuatan pembaharuan dan perubahan kehidupan masyarakat menuju ke masyarakat maju (modern). Sedangkan aspek luar yang membantu pengembangan aspek dalam diri manusia itu adalah peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam arti luas termasuk latihan ketrampilan.

Upaya mengembangkan kedua aspek itu dapat juga disebut sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang utuh. Sebab istilah sumber daya manusia mencakup semua energi, ketrampilan, bakat, pengetahuan manusia yang telah dipergunakan dan/atau yang secara potensial dapat dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.¹ Pengembangan sumberdaya manusia merupakan usaha konkrit yang ditujukan untuk mengubah sumber daya manusia potensial menjadi tenaga kerja produktif. Tenaga kerja dinilai produktif jika mampu menghasilkan "output" atau produk yang lebih

¹Prof. Dr. A.S. Munandar, *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1981), hal. 9.

besar dari tenaga kerja lain untuk satuan waktu yang sama. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: pendidikan, latihan, alat-alat, produksi yang dipergunakan (teknologi), tata nilai kehidupan masyarakat, iklim kerja, gizi dan kesehatan tenaga kerja, serta tingkat upah minimal.²

Tulisan ini mencoba membahas pendidikan dan latihan ketrampilan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Dasar pertimbangannya adalah kenyataan bahwa tenaga kerja kita yang besar jumlahnya itu rata-rata tingkat pendidikannya adalah SD dan tidak memiliki ketrampilan yang sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk itu upaya memberikan latihan ketrampilan kepada mereka merupakan tanggung jawab semua pihak, dan tentu yang terutama adalah pemerintah, lingkungan perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan. Semua kegiatan ini dilakukan di luar lingkungan sekolah.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH

Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi juga dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Maksudnya, sekolah merupakan tempat terjadinya transformasi informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosialisasi diri menuju kedewasaan. Oleh karena itu setiap tingkat pendidikan mempunyai tujuan ganda, yaitu menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke tingkat yang lebih tinggi dan memasuki lapangan kerja. Di tingkat sekolah menengah tujuan ini ada, baik di sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan.

Usaha untuk merealisasi tercapainya tujuan ganda ini dalam diri peserta didik terlihat dalam kurikulum pendidikan di setiap tingkat dan jenis sekolah. Dalam kurikulum pendidikan tercantum begitu banyak mata pelajaran sehingga waktu yang dialokasikan bagi setiap mata pelajaran sangat sedikit. Oleh karena itu terlihatlah satu kenyataan dalam diri peserta didik, yaitu mengetahui banyak informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi tidak mendalam dan meluas. Dengan perkataan yang lebih sederhana, yaitu peserta didik kita di semua tingkat pendidikan hanya mengetahui sedikit-sedikit dari materi setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah.

Selain masalah kurikulum sekolah sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia juga mempunyai masalah lain yang turut menjadi faktor

²J. Ravianto (peyunting), *Produktivitas dan Mutu Kehidupan* (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, 1985), hal. 11-12.

penghambat tercapai tujuan ganda itu. Faktor penghambat itu antara lain adalah kurangnya tenaga guru bidang studi. Hal ini terutama dirasakan oleh sekolah-sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan. Akibatnya di sekolah-sekolah guru-guru mengajar bidang studi yang bukan bidang keahliannya. Di samping itu hampir semua sekolah tidak memiliki sarana dan fasilitas penunjang proses belajar peserta didik dan guru mengajar. Hampir semua sekolah tidak mempunyai perpustakaan sekolah, laboratorium untuk praktek (fisika, kimia, biologi, dan bahasa) dan bengkel-bengkel kerja sebagai tempat latihan ketrampilan.

Suasana pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah seperti ini mendorong orang untuk berpendapat bahwa sekolah-sekolah kita mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi belum mampu menghasilkan peserta didik yang *siap pakai* di dalam lapangan kerja sesuai dengan spesialisasi yang diperolehnya dari tingkat dan jenis sekolahnya. Pendapat itu selanjutnya mengatakan bahwa sekolah-sekolah kita baru mampu menghasilkan peserta didik yang *siap latih* sesuai dengan bidang kerja yang dimasukinya. Oleh karena itu latihan ketrampilan bagi peserta didik yang telah menyelesaikan satu tingkat pendidikan formal tertentu sebelum mereka memasuki lapangan kerja dan latihan pra-kerja bagi mereka setelah mereka dinyatakan diterima oleh satu lingkungan pekerjaan perlu diberikan.

SIAPA YANG PERLU DILATIH

Melatih siapa dan untuk maksud serta tujuan apa. Secara mudah pertanyaan ini dapat dijawab dengan melatih orang-orang yang membutuhkan latihan. Maksudnya agar mereka dapat memiliki ketrampilan untuk bekerja. Tujuannya adalah mereka mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seseorang yang memiliki ketrampilan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Akibatnya produktivitas kerja akan meningkat pula. Dengan perkataan lain, orang-orang yang membutuhkan latihan ketrampilan ini adalah semua angkatan kerja kita sesuai dengan minat dan lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan minat terutama diberikan kepada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Misalnya, pertukangan, pengelolaan pertanian dalam arti luas, mesin/perbengkelan, jahit-menjahit, dan ketrampilan di bidang jasa-jasa lainnya. Sedangkan yang berdasarkan lingkungan pekerjaannya terutama diberikan kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti di lingkungan pabrik, perusahaan, perakitan, dan birokrasi pemerintahan. Ini berarti semua orang terutama angkatan kerjanya memerlukan latihan ketrampilan.

Biro Pusat Statistik (BPS) menyajikan data bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia pada permulaan Pelita IV (1984) adalah sebesar 65,2 juta orang. Lima

tahun kemudian, yaitu pada akhir Pelita IV (1989) jumlah itu akan bertambah menjadi 74,8 juta orang. Artinya, setiap tahun angkatan kerja kita bertambah sebesar 1,9 juta orang.³ Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah besar ini perlu diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja. Apabila tidak maka barisan pengangguran akan bertambah panjang di tanah air kita. Dan para penganggur ini pada umumnya adalah angkatan kerja muda usia. BPS juga menyajikan data tentang laju pertumbuhan angkatan kerja menurut umur. Data itu menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang berumur 10-14 tahun menurun. Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah mengadakan wajib belajar sehingga anak dalam kurun usia itu masih sekolah. Jumlah angkatan kerja yang bertambah pesat berada dalam usia 20-44 tahun (usia dewasa).

Selain tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan tersedianya lapangan/kesempatan kerja, masih ada masalah penting lain, yaitu bahwa lebih dari 50% tenaga kerja yang ada dan yang telah bekerja di berbagai jenis usaha, khususnya untuk pekerjaan tingkat bawah belum menamatkan Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak pernah bersekolah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dan angkatan kerja kita umumnya masih sangat memerlukan latihan ketrampilan. Apabila tingkat pendidikan formal menjadi indikasi tingkat penguasaan ketrampilan (hal ini belum tentu benar mengingat kurikulum pendidikan formal yang masih mempunyai tujuan ganda) maka kita dapat mengatakan tingkat penguasaan jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari keadaan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan seperti yang tertera dalam Tabel 1.

Dari tabel itu terlihat bahwa angkatan kerja kita tahun 1980 memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu sejumlah 88,2% dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah itu dapat dibagi atas, yang buta huruf 29%, yang putus sekolah dasar 37,15% dan yang lulus SD hanya 21,95%. Sedangkan yang berpendidikan SLTP hanya sebesar 5,2% dan SLTA 5,8%. Dengan kondisi angkatan kerja seperti ini maka ada lowongan kerja yang menuntut persyaratan khusus seperti memiliki ijazah tertentu dan yang menguasai jenis ketrampilan yang diperlukan oleh lapangan kerja itu tidak dapat terisi. Kenyataan ini mendorong kita untuk berikhtiar sungguh-sungguh terutama pihak yang berwenang untuk melaksanakan latihan dan bimbingan ketrampilan bagi semua angkatan kerja kita. Melalui pendidikan dan latihan itu angkatan kerja kita akan bertambah menguasai informasi tentang pengetahuan dan ketrampilan pekerjaannya. Penguasaan kedua hal itu akan mendorong meningkatkan produktivitas kerja.

³Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, 1982, hal. iv.

Tabel 1
ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
1971 DAN 1980

	1971		1980	
	Juta Orang	%	Juta Orang	%
1. Tidak pernah sekolah	17,6	42,67	15,1	29,01
2. Belum tamat SD	11,8	28,53	19,4	37,15
3. Sekolah Dasar (SD)	9,0	21,83	11,4	21,95
4. SLTP Umum	1,1	2,75	2,1	4,02
5. SLTP Kejuruan	0,5	1,38	0,6	1,16
6. SLTA Umum	0,5	1,23	1,3	2,45
7. SLTA Kejuruan	0,5	1,22	1,7	3,33
8. Akademi/ Universitas	0,2	0,49	0,5	0,86
9. Lain-lin	—	—	0,2	0,04
Jumlah	41,3	100,00	52,1	100,00

Sumber: 1. BPS: *Sensus Penduduk 1971*, Seri D.
2. BPS: *Sensus Penduduk 1980*, Seri S, No. 1.

MATERI LATIHAN KETRAMPILAN

Materi latihan ketrampilan harus sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang mengikuti latihan itu. Maksudnya, jenis ketrampilan dan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan ketrampilan itu dapat membantunya untuk berusaha dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya dan sekaligus memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu kelompok masyarakat yang ingin mengikuti latihan ketrampilan ini perlu dibagi atas dua, yaitu pertama, kelompok masyarakat yang masih dalam status pencari kerja atau yang belum bekerja; dan kedua, kelompok masyarakat yang sudah bekerja baik di sektor pemerintah ataupun swasta.

Bagi kelompok yang pertama materi latihan itu harus disesuaikan dengan minat atau orientasi pekerjaan yang diinginkannya. Dengan cara ini terlihat bahwa latihan diberikan kepada mereka yang benar-benar mempunyai kemauan dan keinginan mempersiapkan dirinya memasuki lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu pada saat seleksi penerimaan para peserta latihan, para penyelenggara perlu mengadakan semacam test guna mengetahui minat dan orientasi pekerjaan yang diinginkan oleh calon peserta.

Bentuk test dapat dilakukan secara tertulis ataupun dalam bentuk wawancara secara individual. Dari proses itu para penyelenggara dapat juga mengetahui tentang motivasi dari masing-masing calon peserta. Sedangkan untuk kelompok kedua, sifat dari latihan itu adalah "in service training" atau "job training" dan hal ini dilakukan oleh instansi atau perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan latihan ini biasanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ataupun untuk keperluan promosi dan mutasi jabatan.

Yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara latihan adalah materi latihan itu harus disesuaikan juga dengan tujuan dan maksud dari masing-masing latihan. Sebab latihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia perlu diarahkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang potensial menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh pihak penyelenggara. Selama ini terlihat di setiap lingkungan pekerjaan atau instansi pemerintahan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal. Kenyataan ini mungkin disebabkan oleh kekurangan jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki kaum pekerja kita. Dan kenyataan ini pula yang menjadi faktor pendorong pengembangan inovasi tentang perlunya latihan ketrampilan.

Materi latihan meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Dewasa ini telah terlaksana berbagai macam jenis latihan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan dan minat. Di lingkungan pabrik dan perusahaan diadakan latihan "pra-tugas," manajemen, in job training, in service training, dan lainnya. Di instansi pemerintahan komponen latihan masuk dalam setiap proyek yang diselenggarakan, dan pada saat kenaikan jenjang kepangkatan. Di samping itu lembaga-lembaga swasta juga menyelenggarakan latihan bagi para "drop-out" SD berupa latihan ketrampilan; para calon transmigrasi mendapat latihan pertanian; para ibu rumah tangga mendapat latihan jahit, memasak, dan merawat anak; para pengrajin menerima latihan tentang pemasaran; para pemuka masyarakat menerima latihan kepemimpinan; para kader desa diberikan latihan pengembangan masyarakat desa; para pekerja di bengkel mendapat latihan tentang permesinan; para tukang batu dan kayu juga menerima latihan sesuai dengan bidang kerjanya.

Dengan demikian terlihat bahwa selama hidup ini kita selalu terlibat dalam kegiatan menerima latihan ataupun memberikan latihan. Dan proses ini akan terus berkembang sesuai dengan perubahan dan tuntutan baru yang hidup dalam suatu masyarakat yang dinamis. Perubahan kehidupan masyarakatlah yang menjadi faktor pendorong dan sekaligus tujuan dari kegiatan latihan. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan latihan para pelatih harus mampu mendorong motivasi para peserta latihan agar selalu tanggap terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang begitu cepat. Kecepatan perubahan ini

menuntut kemampuan kita untuk dapat menyesuaikan dan menempatkan diri di dalam proses perubahan ini. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal rupanya sudah tidak mampu mengikuti arus gerak perubahan yang begitu cepat. Hal ini terlihat dalam kelambanan sekolah mengantisipasi kecepatan perubahan ini melalui perubahan kurikulumnya. Kelambanan kurikulum sekolah mengantisipasi kecepatan perubahan kehidupan masyarakat bersama dengan tingkat kebutuhannya mendorong tumbuh dan berkembangnya kursus-kursus dan program-program latihan ketrampilan yang beranekaragam dewasa ini.

TUJUAN LATIHAN

Tujuan latihan perlu dirumuskan secara jelas dan tepat serta benar. Sebab tujuan ini merupakan sasaran yang menunjukkan berhasil tidaknya suatu program latihan. Suatu program latihan pada umumnya mempunyai tiga sasaran, yaitu (1) meningkatkan ketrampilan para peserta latihan; (2) meningkatkan penguasaan pengetahuan sesuai dengan bidang ketrampilan; dan (3) mempengaruhi terjadinya perubahan sikap hidup dalam diri para peserta latihan. Ketiga sasaran ini merupakan satu paket program latihan dan tidak dapat dipisahkan-pisahkan. Suatu program latihan dikatakan berhasil apabila ketiga sasaran itu telah menjadi milik para peserta latihan.

Dengan memiliki ketiga hal itu maka angkatan kerja kita akan mampu menjadi angkatan kerja yang produktif, dan berkemampuan melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang ketrampilan yang dikuasainya. Dengan cara ini ia akan juga berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini berarti peningkatan produktivitas kerja, seseorang akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan turut menjadi faktor penunjang peningkatan pendapatannya.

Oleh karena itu latihan yang diberikan kepada peserta latihan atau angkatan kerja kita harus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh mereka sendiri. Mereka menerima bahwa bahan latihan ini akan turut atau dapat membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selama proses latihan itu berlangsung mereka perlu diberikan kesempatan untuk menghayati manfaat latihan itu. Ini merupakan suatu proses psikologis yang dapat menunjang perkembangan motivasi dalam diri mereka sendiri untuk benar-benar menerapkan ketrampilannya di lingkungan pekerjaannya.

Yang perlu disadari oleh pihak penyelenggara latihan adalah bahwa latihan ini diberikan kepada angkatan kerja yang siap memasuki lapangan pekerjaan. Oleh karena itu mereka umumnya telah memasuki tahap kedewasaan dalam arti usia dewasa menurut kalender ataupun kedewasaan secara sosial ekonomis. Maksudnya, telah timbul di dalam diri mereka kesadaran untuk mengem-

bangkan tanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian para penyelenggara latihan harus mampu memilih jenis-jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara ini setiap peserta latihan akan merasakan bahwa dengan mengikuti latihan ini kebutuhannya terpenuhi dan tentu ia akan menerapkannya secara langsung di dalam kehidupannya sehari-hari terutama di lingkungan pekerjaannya. Apabila setiap peserta latihan setelah mengikuti satu paket program latihan merasa bahwa mereka telah memiliki/menguasai secara lebih baik satu jenis ketrampilan dan mempunyai kemauan yang kuat untuk menerapkannya di lingkungan pekerjaannya maka itu berarti suatu program latihan mencapai sasaran/tujuannya.

METODE LATIHAN

Kita perlu menyadari bahwa latihan ketrampilan ini berbeda dengan proses belajar-mengajar di sekolah. Hubungan antara pelatih/fasilitator dengan peserta latihan juga berbeda dengan hubungan antara guru-murid di sekolah. Oleh karena itu metode yang dipakai oleh guru waktu mengajar di depan kelas belum tentu dapat dan baik dipakai oleh pelatih di dalam suatu proses latihan ketrampilan. Di depan kelas guru berperan sebagai pemberi informasi tentang ilmu pengetahuan yang umumnya bersifat teoritis. Sedangkan pelatih/fasilitator di depan peserta latihan berperan sebagai pemberi informasi pengetahuan yang berkaitan dengan satu jenis ketrampilan tertentu. Oleh karena itu bersifat praktis. Hal ini terlihat secara jelas dalam kurikulum. Kurikulum sekolah berisi lebih banyak pengetahuan yang bersifat teoritis dengan maksud untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan kurikulum latihan ketrampilan sebagian besar terdiri dari pengetahuan-pengetahuan praktis yang siap untuk diterapkan di lingkungan pekerjaan. Dengan demikian terlihat bahwa metode yang dipakai di dalam dua jenis pertemuan itu tidak selalu sama. Pelatih perlu mengetahui bahwa tidak ada satu metode pun yang dianggap paling tepat untuk dipakai dalam satu program latihan. Semua metode memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu pelatih perlu memiliki kemampuan untuk memilih metode yang sesuai dengan materi dan suasana umum di dalam suatu proses latihan.

Mengingat bahwa program latihan ketrampilan ini diberikan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu maka para pelatih atau fasilitator dalam menentukan suatu metode penyampaian perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu (1) hasil akhir yang ingin dicapai oleh program latihan itu; (2) kemampuan pelatih itu sendiri; (3) kemampuan, minat, dan harapan dari peserta latihan; dan (4) waktu, bahan, fasilitas, dan biaya latihan.⁴ Hasil akhir dari suatu program

⁴Lihat, *Syllabus Latihan bagi Pelatih*, yang diterbitkan oleh Pusdiklat Tenaga Pengembang Kelompok Swadaya, Badan Pengembangan Swadaya Masyarakat, Jakarta.

latihan adalah peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan sikap di dalam diri peserta latihan. Oleh karena itu para pelatih di dalam menyampaikan bahan latihan harus mengetahui secara benar, bagian manakah dari bahan itu yang berperan menambah pengetahuan, yang berperan menambah ketrampilan, dan yang mempengaruhi terjadinya perubahan sikap peserta latihan. Dengan mengetahui hal tersebut pelatih dapat memilih metode penyampaian yang sesuai dengan maksudnya.

Pelatih atau fasilitator dalam satu program latihan perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya terutama dalam proses komunikasi bahan latihan dengan peserta latihan. Oleh karena itu pelatih harus mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Artinya pelatih harus yakin bahwa materi yang akan disampaikan itu telah dipahaminya secara benar. Pemahaman itu meliputi pemahaman teoritis dan teknis. Maksudnya, pemahaman yang berhubungan dengan informasi pengetahuan tentang bahan itu, dan kemampuan untuk menggunakan peralatan penunjang proses latihan sehingga peserta latihan dapat meningkatkan ketrampilannya. Selanjutnya pelatih harus mampu mendorong motivasi dalam diri peserta latihan agar mereka dapat mengembangkan sendiri semua bahan latihan itu di lingkungan pekerjaannya masing-masing. Persiapan diri yang sungguh-sungguh dari pelatih merupakan titik awal keberhasilan dari seluruh program latihan.

Di samping itu pelatih perlu mengenal kemampuan individual dari peserta latihan. Indikasinya dapat terlihat melalui jenjang pendidikan formal yang pernah diikutinya. Dengan mengetahui tingkat pendidikan formal para peserta latihan, pelatih dapat mengatur bahasa sebagai sarana komunikasi dalam program latihan itu. Maksudnya istilah-istilah asing yang sudah ada bahasa Indonesia, para pelatih perlu menggunakan istilah bahasa Indonesia. Ini berarti komunikasi dapat berlangsung secara jelas dan benar serta dapat dimengerti oleh peserta latihan. Para pelatih harus mengetahui bahwa peserta latihan pada umumnya sudah lama tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Pelatih atau pihak penyelenggara latihan perlu menyiapkan semua alat peraga yang diperlukan di dalam suatu program latihan.

Selanjutnya kita perlu mengenal beberapa metode yang secara umum dipergunakan oleh pelatih atau fasilitator di dalam setiap program latihan. Para pelatih perlu menyadari bahwa setiap metode ini dapat dipergunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama secara bervariasi tergantung dari hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu program latihan. Metode-metode itu adalah : diskusi, permainan peranan, studi kasus, simulasi, proyek penerapan, dinamika kelompok, dan ceramah. Keberhasilan penggunaan metode ini sangat bergantung pada pelatih atau fasilitator.

Metode diskusi dipakai sebagai sarana untuk bertukar informasi pengetahuan dan ketrampilan di antara pelatih/fasilitator dengan para peserta latihan.

Dalam forum ini setiap peserta saling mengungkapkan pendapatnya dan bersedia menerima pendapat yang lain apabila pendapat itu benar menurut kelompok diskusi. Metode ini perlu dipakai oleh para pelatih mengingat para peserta latihan adalah orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman di dalam satu lingkungan pekerjaan. Forum ini dapat juga diubah menjadi tempat untuk saling bertukar pengalaman tentang pekerjaan. Akhirnya pimpinan diskusi harus menyimpulkan sesuatu yang disetujui bersama untuk dilakukan oleh masing-masing peserta atau bersama-sama di lingkungan pekerjaannya. Metode ini dapat diterapkan dalam beberapa bentuk seperti seminar, diskusi panel ataupun curah pendapat (brain storming).

Metode permainan peranan (role playing): Pelatih/fasilitator membagi para peserta menurut peranan mereka dalam pekerjaan mereka sesungguhnya. Pelatih memberikan penjelasan singkat tentang situasi dan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing pemegang peranan. Metode ini akan mendorong para pemegang peranan untuk bertindak wajar sesuai dengan fungsinya. Sikap dan perilaku ini diharapkan akan tetap diperlihatkannya di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya. Pelatih/fasilitator hanya berfungsi sebagai pengamat dan penggerak agar kegiatan permainan ini dapat berjalan seperti yang dikehendaki oleh kelompok.

Metode studi kasus dapat dilaksanakan oleh pelatih dengan cara memberikan tugas kepada setiap peserta atau kelompok peserta untuk menyelidiki suatu kejadian yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan, dengan maksud mengetahui sebab dari suatu permasalahan dan kemudian berusaha bersama untuk memecahkannya. Cara ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertukar pendapat dan mencari kemungkinan-kemungkinan penyelesaian persoalan. Hal ini tentu akan berguna bagi para peserta di lingkungan pekerjaan masing-masing.

Metode simulasi menempatkan setiap peserta sebagai anggota satu kelompok dan di dalam kelompok itu mereka bersama-sama berusaha untuk mencari cara atau jalan terbaik untuk mengembangkan satu unit usaha sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh pelatih/fasilitator. Melalui metode ini kemampuan masing-masing peserta sebagai anggota kelompok akan tampak sehingga akan melahirkan sikap untuk saling menghargai dan menghormati pendapat di antara sesama anggota kelompok ataupun dengan kelompok lainnya.

Metode proyek penerapan dilaksanakan dengan cara pelatih/fasilitator memberikan tugas kepada masing-masing peserta. Cara melaksanakan tugas itu sepenuhnya diserahkan kepada peserta sendiri. Pelatih hanya mengetahui bahwa tugas itu apabila dilaksanakan dengan baik oleh peserta akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Metode ini memberikan kesem-

patan kepada para peserta untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreasinya sendiri serta menetapkan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai maksud kelompok. Cara ini mengembangkan dan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri.

Metode dinamika kelompok diberikan oleh pelatih dengan maksud agar setiap peserta dapat mempelajari akibat dari kelakuannya terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Cara ini akan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang apa sebab dan mengapa orang-orang berperilaku seperti itu di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Cara ini juga mendorong setiap peserta untuk melakukan komunikasi tentang perilaku dan sikapnya sehari-hari. Cara ini akan sangat sulit dilakukan oleh peserta yang tertutup (introvert).

Ceramah merupakan cara penyajian yang bersifat monolog sehingga tidak selalu disukai oleh para pelatih. Mereka selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari pemakaian metode ini. Para pengamat juga berpendapat bahwa metode ini sebaiknya tidak dipergunakan di dalam program latihan ketrampilan. Di sekolah-sekolah formal juga para guru selalu berusaha untuk mengkombinasikan metode ini dengan metode lain dalam proses belajar-mengajar. Metode ini menempatkan para peserta latihan pada posisi pasif (duduk, mendengarkan, dan mencatat bila perlu) dan yang aktif hanya pelatih.

Pelatih/fasilitator dapat memilih satu metode atau kombinasi dari metode-metode itu dalam satu proses latihan. Metode mana yang paling sesuai untuk dipergunakan diserahkan sepenuhnya pada para pelatih sendiri. Yang perlu diperhatikan oleh para pelatih dalam menetapkan metode yang akan dipakai adalah tersedianya alat peraga penunjang pelaksanaan suatu proses latihan. Penerapan suatu metode yang ditunjang oleh alat peraga yang sesuai disertai dengan kemampuan pelatih untuk mendemonstrasikannya di depan peserta latihan akan sangat membantu tercapainya tujuan dari latihan itu.

PELAKSANAAN LATIHAN

Penyelenggara latihan harus menyadari bahwa suatu program latihan dapat terlaksana secara baik hanya melalui suatu tahap persiapan yang baik pula. Tahap persiapan ini meliputi pengadaan tenaga-tenaga pelatih/fasilitator, pengadaan ruang/bengkel kerja yang memadai, pengadaan sarana dan fasilitas penunjang proses latihan, akomodasi para peserta latihan, dan yang terpenting adalah menciptakan suasana yang baik agar dapat terjadi komunikasi timbal-balik antara peserta, pelatih, dan pihak penyelenggara latihan sebagai pemegang tanggung jawabnya.

Latihan selalu terwujud dalam proses belajar-mengajar di antara peserta latihan dengan pelatih/fasilitator. Dalam proses ini terjadi komunikasi antara

warga belajar dengan sumber belajar. Dalam komunikasi ini akan terlihat apakah peserta latihan itu ditempatkan sebagai pihak yang pasif atau aktif. Maksudnya, apakah peserta latihan itu hanya menerima saja sebagaimana adanya berbagai materi latihan yang diberikan oleh pelatih (pasif), ataukah peserta latihan itu melibatkan diri di dalam proses belajar itu untuk memperoleh pengalaman belajar (aktif). Yang baik di dalam suatu latihan ketrampilan adalah peserta latihan yang aktif dan ikut berpartisipasi sepenuhnya di dalam proses itu.

Oleh karena itu keterbukaan dan komunikasi dua arah perlu dikembangkan oleh semua pihak di dalam proses latihan itu. Peranan fasilitator dalam menciptakan suasana keterbukaan di antara sesama peserta atau dengan pelatih sangat menentukan. Suasana ini akan menunjang proses pemahaman materi latihan. Pada latihan orang dewasa materi latihan ditemukan, dibahas, dan dikembangkan bersama oleh peserta latihan dan pelatihnya melalui proses kegiatan – refleksi – kegiatan. Cara ini akan turut mengembangkan kemampuan berpikir dan menganalisis suatu masalah secara bersama-sama dalam kelompok. Fasilitator harus mampu menghidupkan suasana diskusi yang analitis ini tetapi sekaligus harus mampu membatasi keterlibatannya sehingga ia tidak menguasai jalannya diskusi. Peran serta para peserta latihan harus diutamakan oleh fasilitator.

Dengan cara ini para peserta latihan akan menghayati materi latihan yang terkandung dalam program latihan itu. Penghayatan materi ini akan terlihat dalam sikap dan perilaku para peserta latihan yang terwujud dalam ketrampilan berpikir dan bekerja tangan, menguasai informasi pengetahuan yang berhubungan ketrampilannya, dan sikap mental yang menunjang pengembangan ketrampilannya seperti disiplin waktu, bekerja keras, efisien, dan mengutamakan mutu pekerjaan. Di samping itu akan terlihat juga perubahan dalam perilaku sosial di dalam kelompok ataupun masyarakat luas. Ini berarti bahwa latihan itu akan membawa perubahan-perubahan di dalam diri para peserta latihan.

Untuk mengetahui adanya perubahan sikap dan perilaku peserta latihan maka pada tahap akhir dari satu program latihan para fasilitator dan penyelenggara latihan perlu mengadakan semacam penilaian. Dalam tahap ini fasilitator dan peserta latihan perlu meninjau dirinya apakah sudah memiliki sikap dan perilaku baru yang diperoleh dari program latihan itu. Penilaian itu harus meliputi aspek kognitif (perubahan pengetahuan), aspek afektif (perubahan sikap dan perilaku), dan aspek psikomotorik (bertambahnya ketrampilan berpikir dan bekerja tangan), serta perubahan dalam sikap dan perilaku untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Di samping itu para peserta perlu diberikan kesempatan untuk menilai para pelatih/fasilitatornya. Penilaian ini meliputi beberapa segi seperti penampilan pelatih, penguasaan materi, dan penguasaan penggunaan alat peraga, serta penguasaan metode penyampaian. Selain itu para peserta juga diberikan

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang pelaksanaan kurikulum latihan, materi-materi latihan yang perlu diberikan secara intensif, dan saran perbaikan lain-lainnya. Semua ini berguna bagi para penyelenggara untuk lebih menyempurnakan program-program latihannya.

PENUTUP

Latihan pada hakikatnya juga merupakan suatu proses belajar-mengajar. Peserta latihan suatu unit program ketrampilan selalu menempuh proses dalam satu jangka waktu tertentu secara bersama-sama dengan maksud menambah pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah perilaku dengan bantuan para pelatih/fasilitator. Dengan demikian terlihat bahwa latihan juga merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Latihan-latihan ini menjadi lebih penting lagi peranannya mengingat pendidikan formal (sekolah) di semua tingkat dan jenis belum mampu menghasilkan angkatan kerja yang siap pakai di lapangan pekerjaan.

Mengingat sumber daya angkatan kerja kita yang besar jumlahnya dan memiliki tingkat ketrampilan yang rendah sehingga tidak mampu mengisi lowongan kerja yang tersedia maka penanganan latihan-latihan ketrampilan bagi angkatan kerja umumnya dan tenaga kerja khususnya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan departemen teknis lainnya telah melakukan latihan-latihan itu. Departemen Tenaga Kerja dengan Balai Latihan Kerjanya telah mendidik tenaga-tenaga kerja trampil. Demikian juga Departemen Perindustrian, Pertanian, Koperasi, Transmigrasi, dan P dan K melalui direktorat pendidikan luar sekolah.

Di samping itu organisasi sosial politik dan sosial kemasyarakatan terutama yang terhimpun berdasarkan kesamaan profesi dan fungsi dapat juga berperan sebagai penyelenggara program latihan ketrampilan bagi anggota kelompoknya masing-masing. Perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun swasta perlu melakukan juga latihan ketrampilan bagi tenaga kerja di lingkungan pekerjaannya masing-masing. Rupanya saat ini telah ada perusahaan-perusahaan yang melakukannya dan bagi perusahaan-perusahaan seperti ini pemerintah perlu mendorong usaha ini agar terus berkesinambungan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan latihan ini perlu didorong oleh pemerintah untuk secepatnya melakukannya. Sebab ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh tenaga kerja akan menjadi pendorong utama meningkatnya produktivitas kerja. Melalui latihan seperti ini sumber daya tenaga kerja yang potensial dapat diubah menjadi sumber daya yang fungsional. Dengan cara ini jumlah tenaga kerja yang besar ini tidak akan menjadi beban tetapi menjadi ahmat.

Relevansi Kebangkitan Nasional*

Cosmas BATUBARA

PENGANTAR

Budi Utomo merupakan suatu organisasi modern, yang menjadi pelopor untuk melahirkan kader-kader bangsa. Sebagaimana halnya Budi Utomo, IKIP sebagai bagian dari perguruan tinggi juga merupakan suatu tempat atau candradimuka untuk melahirkan kader-kader bangsa. Oleh karena itu sangat tepatlah bila peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu diselenggarakan di kampus IKIP ini.

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-78 ini, pada tempatnyalah bila kita menelusuri dan mendalami Sejarah Kebangsaan Indonesia yang berasal mula dengan berdirinya Budi Utomo sampai Orde Baru dewasa ini.

Melihat ke belakang ataupun mengadakan refleksi semacam ini kiranya perlu bagi suatu bangsa yang sedang giat-giatnya membangun. Melihat, mempelajari ataupun mengadakan refleksi semacam ini bukan berarti kita bermaksud menenggelamkan kita ke dalam suasana masa lampau ataupun mengungkit-ungkit suatu permasalahan masa lalu, tetapi sebaliknya justru untuk menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman lampau itu, sehingga kegagalan-kegagalan masa lampau itu tidak akan terulang lagi. Hal ini kiranya sangat berguna bagi kita yang sedang mengarungi masa kini dan bersiap-siap mengarungi masa depan.

Belajar masa lampau untuk mengerti masa kini dan mempersiapkan masa depan. Masa kini adalah produk masa lampau, dan masa yang akan datang adalah produk masa kini.

*Disampaikan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di IKIP Bandung, 20 Mei 1986. Cosmas Batubara adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

ARTI DAN MAKNA KEBANGKITAN NASIONAL

Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 itu merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan kembali dari tangan penjajah. Budi Utomo menjadi awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Budi Utomo kita akui sebagai suatu organisasi modern dalam rangka perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia kita anggap sebagai pelopor perjuangan yang lebih teratur, rapi dan jelas tujuannya. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum Budi Utomo belum ada gerakan perjuangan kemerdekaan. Hanya sifat dan landasannya yang berbeda.

Sejak kebangkitan nasional itu maka cakrawala bangsa menjadi terbuka, cakrawala dalam lingkup lebih luas, lebih menyeluruh, cakrawala nasional, cakrawala kebangsaan mulai tumbuh. Kebangkitan nasional merupakan suatu babakan yang sangat penting di dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Di dalam babakan ini tumbuhlah paham kebangsaan.

Paham kebangsaan ini memacu tumbuhnya organisasi-organisasi di Indonesia, baik yang bersifat politik maupun bersifat kemasyarakatan. Ada yang didasarkan pada kesukuan, kedaerahan, golongan, asal-usul, keagamaan, kepercayaan, status sosial, dan sebagainya.

Organisasi-organisasi itu terus berkembang dan sangat majemuk. Tetapi dalam kemajemukan itu tumbuh pula rasa persatuan. Persatuan, kesatuan dan semangat kebangsaan itulah yang merupakan titik temu. Terbinalah bhinneka tunggal ika. Kemajemukan dalam persatuan, dan persatuan dalam kemajemukan.

Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan ikrar bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yakni Indonesia menunjukkan bahwa paham kebangsaan itu tumbuh menjadi semakin nyata. Persatuan, kesatuan dan kebangsaan mewarnai perjuangan organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu. Konsep kebangsaan semakin menemukan wujudnya. Suatu konsep yang menghendaki persatuan. Kebangsaan yang tidak didasarkan pada dasar-dasar primordial, seperti etnis, suku, golongan, asal-usul, kedaerahan, status sosial, keagamaan maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi suatu konsep kebangsaan yang mengatasi semuanya.

Akan tetapi sejarah telah mencatat bahwa suasana ini belum dapat dipertahankan. Suasana kemajemukan mewarnai perkembangan perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Salah paham, perselisihan, perbedaan mewarnai suasana perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan ideologi yang dianut oleh organisasi-organisasi yang ada. Hal ini tampak je-

las dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Dipandang dari sudut ideologi, sekurang-kurangnya ada tiga ideologi yang sangat mempengaruhi atau mewarnai suasana pada waktu itu. Mereka itu adalah ideologi keagamaan, ideologi sekular (ada yang sosialis, ada yang komunis, ada pula yang campuran) dan ideologi kebangsaan.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan serta penetapan Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara kebangsaan dan konstitusi kebangsaan pada tahun 1945 itu berarti bahwa paham kebangsaan atau ideologi kebangsaan menemukan formulasinya secara nyata. Namun demikian perlu diingat bahwa kebangsaan yang kita anut itu berbeda dengan kebangsaan yang berasal dari Barat, yang biasa dikenal dengan nasionalisme, meskipun kita akui ada unsur-unsur dari Barat yang mempengaruhi maupun ikut membentuk konsep kebangsaan kita. Antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar, meskipun di dalamnya terkandung beberapa substansi yang dapat menjadi titik temu.

Konsep kebangsaan, ideologi kebangsaan yang kini dijadikan acuan bangsa Indonesia mempunyai ciri atau identitas sendiri. Dia tumbuh dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan mendasarkan dirinya pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep kebangsaan Indonesia adalah bersifat integralistik, dalam arti dia adalah suatu paham yang tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar kelas-kelas. Di dalam negara yang menganut paham integralistik tidak ada warga negara kelas satu ataupun warga negara kelas dua. Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Integralistik adalah semangat yang mengatasi paham golongan dan paham perorangan, serta mendahulukan kepentingan umum atau negara di atas kepentingan kelompok dan perorangan.¹

Dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara kebangsaan dan konstitusi kebangsaan negara Indonesia itu, maka hal-hal yang sifatnya disintegratif atau destruktif disingkirkan. Semuanya tertuju pada kesatuan dan persatuan bangsa. Kompromi terhadap ideologi-ideologi lain yang berbeda dengan ideologi kebangsaan dihapuskan. Kebangsaan mewarnai alam kemerdekaan.

¹Lihat penjelasan Supomo dan Sukardjo Wirjopranoto, dua orang anggota BPUPKI, dalam sidang tahun 1945; M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapantja, 1959, hal. 109-121, dan 382-383.

Munculnya Orde Baru pada tahun 1966 dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen mempunyai arti yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang ini. Dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 itu berarti terjadilah pemurnian konsep kebangsaan. Konsep kebangsaan yang pada masa Orde Lama terpaksa mengadakan kompromi-kompromi dengan ideologi lain kini dimurnikan kembali. Konsep kebangsaan dikembalikan ke relnya yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Hal ini berarti bahwa konsep kebangsaan yang kita jadikan acuan sekarang ini adalah konsep kebangsaan yang dinamis dan kreatif. Konsep kebangsaan yang tidak sempit, tetapi justru suatu konsep kebangsaan yang bercakrawala luas. Hal ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menyadari keadaannya dalam tata pergaulan dunia. Bangsa Indonesia merupakan bagian global dari tatanan dunia internasional.

Konsep kebangsaan kita adalah menentang chauvinisme, oleh karenanya intisari dari konsep kebangsaan kita itu adalah menentang segala bentuk penjajahan. Dengan bertitik-tolak dari sini inilah bangsa Indonesia bercita-cita untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan perdamaian dunia abadi.

Dari perjalanan Orde Baru ini, sejak tahun 1966 sampai dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini, menunjukkan bahwa konsep kebangsaan, ideologi kebangsaan itu semakin mendapatkan tempat di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa dan satu ideologi kini telah tercapai. Persoalannya kini adalah bagaimana operasionalisasi lebih lanjut dari penerimaan satu ideologi, Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu.

Dari lintasan sejarah ini tampak adanya kesinambungan benang merah antara Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Pancasila serta UUD 1945, Orde Baru dan Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Perjuangan Kebangsaan Indonesia itu tidak merupakan hal yang bersifat sepotong-potong, tetapi sebaliknya merupakan suatu kesinambungan yang kontinuitas. Ini semua juga mengandung makna bahwa perjuangan dan pengabdian yang kini sedang dilaksanakan oleh Orde Baru itu juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah diperjuangkan sejak Kebangkitan Nasional.

Dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini kita juga dapat menarik pelajaran bahwa kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang berwawasan nasional

itulah yang telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk tetap tegak kokoh berdiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan itu. Para bapak pendiri republik ini telah melihat jauh ke depan, dan menyadari bahwa hanya dengan kebangsaan, persatuan dan kesatuan itulah bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Hal ini tampak jelas pada kesepakatan mereka pada waktu mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi kebangsaan Negara Kebangsaan Indonesia. Sejak itu mereka sepakat untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menggoyahkan ataupun merintangi tercapainya persatuan Indonesia.

Sampai dewasa ini, kiranya ABRI telah berhasil secara nyata dalam usaha mengamalkan wawasan atau konsep kebangsaan. Hal ini dapat terlaksana karena ABRI konsekuen dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Bertitik-tolak pada kehidupan ABRI dan pelaksanaan reorganisasi ABRI yang dewasa ini sedang giat-giatnya dilaksanakan, pelaksanaan dan pengamalan wawasan kebangsaan dalam tubuh ABRI semakin tampak nyata. ABRI berhasil melaksanakan konsep kebangsaan yang tidak didasarkan pada konotasi etnis, tidak didasarkan pada keturunan, tidak didasarkan pada asal-usul, tidak didasarkan pada golongan, tidak didasarkan pada rasa kedaerahan, tidak didasarkan pada status sosial, tidak didasarkan pada perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maupun tidak didasarkan pada sifat-sifat primordial lainnya. Justru kini ABRI telah siap untuk memasuki wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan lebih lanjut.

Di samping itu, hari jadi Kodam Siliwangi yang diperingati setiap tanggal 20 Mei kiranya juga mengandung arti tersendiri. Persamaan hari jadi ini kiranya juga merupakan salah satu bukti bahwa Korps Siliwangi telah mendalami dan menghayati arti Kebangkitan Nasional.

TANTANGAN – TANTANGAN MASA DEPAN

Perjalanan bangsa Indonesia kini telah sampai pada tahap pembentukan kerangka landasan pembangunan. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan yang telah kita laksanakan sampai sekarang ini belumlah sampai kepada tujuan kita. Pembangunan sekarang ini baru mencapai taraf pembangunan fundasi untuk melangkah, melaju ke depan. Meskipun demikian kita mengakui bahwa telah banyak keberhasilan pembangunan yang telah kita nikmati. Stabilitas nasional dalam masa Orde Baru, penataan-penataan suprastruktur dan infrastruktur politik, telah memungkinkan bangsa Indonesia untuk dapat menyongsong masa depan. Namun demikian, tidak berarti bahwa bangsa Indonesia sudah tanpa tantangan. Tantangan-tantangan dalam rangka tinggal landas tampaknya semakin kompleks dan tidak ringan, baik tantangan yang berasal dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri.

Keberhasilan pembangunan Orde Baru dan perkembangan situasi dunia telah menempatkan Indonesia sebagai bagian global dari tatanan dunia internasional. Hal ini mengakibatkan bahwa perkembangan dunia, baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan sedikit banyak juga akan mempengaruhi atau ikut mewarnai perkembangan Indonesia. Munculnya paham-paham baru, situasi perekonomian dunia yang belum menentu, revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi (perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih), ataupun revolusi jasa, sangat mempengaruhi hubungan antarbangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat mengakibatkan peningkatan mutu persenjataan dunia, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi perdamaian dan keamanan dunia. Kesemuanya ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

Sementara itu di dalam negeri, kita pun tidak dapat menutup mata atas beberapa kekurangan yang harus segera diatasi. Pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi, kematian bayi (angka mortalitas), peningkatan kesehatan, angka buta huruf atau tingkat pendidikan, terutama di masyarakat pedesaan dan lapangan kerja masih memerlukan penanganan secara cermat. Sumber daya alam yang semakin menipis juga memerlukan pengelolaan secara baik. Penemuan-penemuan sumber daya alam baru kini diperlukan. Ini semua memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Semua ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi generasi muda, termasuk para mahasiswa kader-kader bangsa. Hal ini kiranya telah kita sadari, karena kita percaya bahwa masa depan yang terbentang di hadapan kita itu adalah milik generasi muda. Oleh karena itu, para generasi muda ditantang untuk menjawab semua tantangan itu.

KUALITAS MANUSIA MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

Meskipun banyak tantangan menghadang di depan, perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia harus tetap diteruskan dan pembangunan nasional harus terus dilaksanakan. Kontinuitas pembangunan nasional dan sejarah bangsa Indonesia harus tetap dijamin kelangsungannya. Dalam rangka ini, kiranya kualitas manusia, kualitas bangsa Indonesia memegang peranan yang amat menentukan. Bahkan kualitas manusia Indonesia sendiri itulah terutama yang akan menentukan hari depan bangsa dan negaranya.

Hanya bangsa yang berkualitas itulah yang dapat tahan uji terhadap segala cobaan, dan dapat mengatasi persoalan-persoalan ataupun tantangan-tantangan yang ada. Hanya bangsa yang berkualitas itulah yang dapat menjadi bangsa pejuang dan dapat meneruskan perjuangan untuk mempertahankan

kemerdekaan dan kedaulatannya. Hanya bangsa yang berkualitas itulah yang dapat hidup dalam berbagai situasi, bahkan mungkin dalam situasi yang serba tidak menentu sekalipun. Bangsa yang demikian inilah yang tidak akan silau terhadap perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka ini diperlukan manusia-manusia Indonesia yang kuat dan sehat lahir batin, jasmani rohani. Bangsa yang kuat dan sehat itulah yang akan mampu mengatasi berbagai kesulitan.

Selain itu, bangsa yang berkualitaslah yang mampu menyerap, mengambil alih dan mempergunakan kemajuan-kemajuan yang ada bagi kesejahteraan bersama, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya cara berpikir, tingginya penguasaan suatu bangsa atas ilmu pengetahuan dan teknologi itu sadar atau tidak sadar telah menjadi salah satu ukuran maju tidaknya suatu bangsa. Oleh karenanya dalam rangka memasuki tahap tinggal landas mau tidak mau bangsa Indonesia harus dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang pandai, karena dengan kepandaianya itulah bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengolah sumber atau kekayaan alamnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian kemajuan yang didapat dari hasil pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan semakin menampilkan wajah pengamalan Pancasila dan mempertebal semangat kebangsaan. Bahkan dengan kepandaianya itu, dia dapat menemukan hal-hal yang baru ataupun mengembangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya sendiri untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan berbekal itu semua bangsa tersebut siap untuk memasuki zaman modern untuk tumbuh dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa dunia.

Sejarah telah membuktikan bahwa hanya bangsa yang berkualitas itulah yang dapat menjamin kontinuitas dan peningkatan kehidupannya, meskipun bangsa tersebut kekurangan atau tidak mempunyai sumber ataupun kekayaan alam. Misalnya bangsa Jepang, Korea, Taiwan, Belanda, Swiss dan negara-negara Barat pada umumnya, yang dapat maju tanpa didukung oleh sumber kekayaan alamnya. Namun demikian tidak berarti bahwa bangsa Indonesia untuk maju harus menjadi bangsa Korea, Jepang atau Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang mempunyai identitas sendiri, meskipun kita menyadari bahwa adanya hubungan dengan bangsa-bangsa lain atau kebudayaan luar telah mempengaruhi bahkan memperkaya kebudayaan Indonesia. Dengan akulturasi itulah kebudayaan Indonesia semakin tumbuh, berkembang, kaya dan dewasa.

Di samping sebagai bangsa penjuang yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup, sehat jasmani rohani serta sebagai bangsa yang pandai,

maju, dan trampil, maka keterikatan ataupun kesetiaannya kepada ideologi dan dasar negara, Pancasila dan UUD 1945, kiranya juga menjadi tolok ukur seberapa dalam dan tingginya mutu atau kualitas bangsa Indonesia. Hal ini tetap perlu disadari karena kita sebagai masyarakat Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini mengandung arti bahwa kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu akan semakin mempertebal semangat kebangsaan dalam rangka pengamalan Pancasila.

Atas dasar ini maka bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang pandai, maju, trampil dan modern tanpa harus kehilangan arah ataupun meninggalkan tempat berpijaknya, yakni kepribadian bangsa, yang tidak lain adalah Pancasila sendiri, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia akan menjadi bangsa modern yang tetap berdasarkan dan berpedoman pada Pancasila.

KELUARGA, MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN SARANA MENUJU MANUSIA BERKUALITAS

Untuk menciptakan atau mewujudkan manusia berkualitas, bangsa yang berkualitas, maka keluarga, masyarakat dan pendidikan merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Keluarga adalah embrio suatu masyarakat dan bangsa, oleh karena itu suasana dan perkembangan keluarga erat sekali hubungannya dengan perkembangan suatu masyarakat dan bangsa, bahkan dapat dikatakan menjadi dasar perkembangan semua itu. Kualitas suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh sifat dan derajat warga atau keluarga masyarakat yang ada. Oleh karena itu perlu sekali dipikirkan bagaimana cara dan usaha yang dapat meningkatkan derajat warga masyarakat, baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di kota-kota. Program Keluarga Berencana, program makanan bergizi, program kesehatan, lingkungan hidup, program perumahan dan fasilitas untuk belajar, akan sangat menentukan perkembangan ataupun peningkatan derajat mereka. Oleh karena itu program-program tersebut perlu dukungan yang nyata, karena keberhasilan program itu pada gilirannya juga akan menumbuhkan suasana yang sangat diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Sementara itu, masyarakat lingkungannya juga dituntut untuk menghargai keberhasilan atau prestasi warganya. Masyarakat juga dituntut untuk membantu terciptanya suasana yang memungkinkan atau mendukung warganya untuk maju dan berkembang. Sehingga tidak akan terjadi "orang pandai justru terasing dari lingkungannya." Kini permasalahannya bagaimana kita harus memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat, memperluas

wawasan dan cakrawala, sehingga mereka menyadari bahwa kita semua adalah satu. Dengan demikian pengkotak-kotakan atas dasar perbedaan ras, golongan, asal-usul, kedaerahan, tingkat sosial, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan semakin terkubur, meskipun kita tetap mengakui adanya perbedaan yang ada, tetapi perbedaan itu jangan sampai menjadi penghalang tercapainya persatuan. Kita tetap bhinneka tunggal ika. Dengan wawasan nasional dan wawasan kemajuan diharapkan tumbuh solidaritas sosial, solidaritas nasional, yang sangat dibutuhkan pada masa pembangunan yang akan datang nanti.

Untuk mendapatkan manusia, keluarga, masyarakat ataupun bangsa yang berkualitas itu, pendidikan merupakan unsur dan sarana yang sangat penting, bahkan yang menjadi tumpuan utama, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan itu manusia, warga negara, mengajar, belajar dan diajar, mendidik dan dididik, melatih diri dan dilatih untuk menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memanfaatkannya. Pendidikan akan memperluas cakrawala wawasan bangsa sehingga menjadi bangsa yang pandai, dewasa dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan mempertebal semangat kebangsaan atau harga diri sebagai suatu bangsa. Pendidikan adalah tempat kaderisasi bangsa. Melalui pendidikan itu akan dihasilkan kader-kader bangsa yang siap untuk menerima panggilan zaman. Oleh karena itu mutu atau kualitas pendidikan sangat kita harapkan segera tercapai di Indonesia. Mutu atau kualitas bangsa, terutama generasi mudanya, akan sangat ditentukan oleh mutu atau kualitas pendidikan yang ada. Pendidikan perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Dalam rangka ini maka peranan IKIP adalah sangat besar. IKIP harus dapat melahirkan guru-guru, kader bangsa yang siap menerima panggilan zaman. IKIP harus dapat melahirkan guru-guru, yang tidak saja pandai mengajar, tetapi juga pandai mendidik, menanamkan nilai-nilai bangsa, melahirkan manusia-manusia baru yang penuh dedikasi, pengabdian, disiplin tinggi serta penuh dengan semangat perjuangan.

PENUTUP

Dari uraian di atas tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, serta Orde Baru itu merupakan suatu kontinuitas dalam perjalanan kebangsaan Indonesia. Dalam setiap tahapan itu konsep atau ideologi kebangsaan semakin tampak wujud nyatanya. Kebangsaan Indonesia tumbuh secara dinamis dan kreatif. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Orde Baru sekarang ini tidak berbe-

da dengan apa yang diperjuangkan sejak zaman Kebangkitan Nasional, mungkin hanya berbeda penekanannya. Kebangkitan Nasional adalah berjuang merebut kemerdekaan, Orde Baru berjuang mengisi kemerdekaan.

Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang tumbuh dalam kebudayaan Indonesia, suatu konsep kebangsaan yang tidak berdasarkan etnis ataupun ikatan-ikatan primordial lainnya, melainkan suatu konsep yang menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kebangsaan inilah yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari rongrongan-rongrongan, dan konsep ini pula yang memberi kekuatan bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kokoh, kuat, berdiri di tengah-tengah dunia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru telah menghasilkan perbaikan-perbaikan nyata, tetapi kita juga mengakui masih adanya persoalan-persoalan yang harus segera diatasi. Dengan kata lain Orde Baru masih menghadapi tantangan-tantangan. Adanya tantangan-tantangan itu tidak berarti bahwa perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia dan pembangunan nasional terhenti. Sejarah perjuangan bangsa dan pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan harus tetap dilanjutkan.

Sebagai jawaban atas tantangan-tantangan itu diperlukan manusia-manusia yang berkualitas. Untuk menghadapi tantangan zaman bangsa Indonesia harus merupakan bangsa yang berkualitas. Hanya dengan kualitas itulah negara Indonesia dapat terus tumbuh, memasuki tinggal landas, memacu pembangunan, mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Dengan menjadi bangsa yang berkualitas, tidak berarti bahwa bangsa Indonesia harus meninggalkan kepribadiannya. Bangsa Indonesia yang berkualitas adalah bangsa yang maju, pandai, modern, makmur tanpa harus meninggalkan tempat berpijaknya, yakni Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa.

Dengan mendalami perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia, kita mengetahui apa arti Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional menumbuhkan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi modal merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan titik-titik pada arti inilah kita menyadari relevansinya memperingati tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Semangat Kebangsaan dan Dinamika Masyarakat

Medelina KUSHARWANTI

Peringatan hari Kebangkitan Nasional tahun ini, merupakan renungan atas makna hari bersejarah tersebut, seperti yang tertuang dalam Keppres No. 1/1985. Rumusan Keppres tersebut berisi tujuan peringatan hari Kebangkitan Nasional, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional di samping mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan.¹ Tentunya ini bukan sekedar rumusan yang temporal, yang amat dibatasi waktu dan berlaku hanya di tahun lalu atau hanya pada setiap peringatan hari Kebangkitan Nasional.

Rumusan yang diajukan tersebut merupakan "interpretasi" yang konkret atas peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa yang dipandang perlu untuk dilestarikan, sehingga idealisme dan semangat yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dan menjadi penghela usaha-usaha pembangunan yang tengah dilaksanakan pada saat ini. Secara demikian perjalanan bangsa yang menegara ini tidak pernah akan terlepas dari cita-cita persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kondisi yang diharapkan terwujud tersebut tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan beberapa prasyarat yang wajib dipenuhi antara lain:

1. Adanya kemauan dan kemampuan seluruh masyarakat dalam memahami cita-cita kebangsaan. Sekaligus taat dan konsekuen terhadap komitmen tersebut.
2. Adanya kemampuan seluruh masyarakat dan segenap penyelenggara negara untuk memiliki perspektif operasional mengenai masa depan bangsa.

¹Lihat harian *Suara Karya*, 20 Mei 1985.

Tulisan ini bertujuan mengedepankan aktualitas dan relevansi semangat kebangsaan masyarakat sekarang ini. Meskipun harus diakui bahwa di dalam proses pengamalannya tidak sedikit menghadapi tantangan, bagaimanapun juga semangat kebangsaan tetap memiliki "fleksibilitas" dalam berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang bergerak dan berubah.

RELEVANSI DAN AKTUALITAS

Peristiwa 20 Mei 1908, dipandang memiliki nilai-nilai yang patut dilestarikan dan dikembangkan secara berkesinambungan oleh generasi kini dan masa datang. Pandangan demikian muncul atas dasar beberapa alasan. Yang pertama, meskipun pada mulanya Budi Utomo sebagai gerakan pertama yang bersifat nasional mengarahkan program dan kegiatannya pada bidang pendidikan, pertanian, perdagangan dan kebudayaan, namun berpangkal dari aktivitas mereka yang berguna bagi masyarakatnya yang sedang terkungkung dalam belenggu penjajahan, tergalilah konsep kebangsaan kita. Konsep kebangsaan tersebut mengandung hakikat segolongan manusia yang mendasarkan diri pada kesamaan nasib, cita-cita dan historis ingin berusaha mewujudkan kehendak hidup bersama di dalam suatu wilayah tertentu dengan membentuk pemerintah negara yang berdaulat.

Muhammad Hatta, seorang putra Indonesia, pada tahun 1932 memberikan pengertian kebangsaan sebagai "haruslah dihindangi semangat rakyat, adanya berdasarkan kerakyatan. Asas kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan sebahagia bagi rakyat, kalau ia beralasan kedaulatan rakyat."²

Dalam pengertian yang demikian maka kebangkitan nasional yang mulai diitupkan lebih dari tiga perempat abad yang lalu, serta semangat kebangsaan yang tergalil dari padanya tidaklah akan lapuk termakan oleh waktu. Hal ini dilandasi kesadaran akan adanya tekad untuk tetap konsekuen terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan sistem pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat. Kebangkitan Nasional dan semangat kebangsaan merupakan "jiwa" yang menghidupkan serta berbaur dengan setiap usaha dan kerja rakyat Indonesia, sehingga kedua elemen tersebut membentuk jalinan resiprokal.

²Muhammad Hatta, *Ke arah Indonesia Merdeka* (1932), sebagaimana dikutip oleh H. Rosihan Anwar, *Analisa*, 11 November 1984, hal. 880.

Di samping itu sejarah menunjukkan juga bahwa semangat kebangsaan dan idealisme yang tumbuh telah membentuk perjuangan masyarakat menjadi perjuangan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengatasi paham golongan dan perorangan, sehingga menghantarkan rakyat Indonesia mencapai kedaulatannya. Semangat kebangsaan yang telah ditumbuhkan tersebut tidak berhenti, sebab di dalamnya terkandung hakikat, cita-cita dan kehendak yang ingin dicapai, dalam kaitan inilah semangat kebangsaan masih memiliki aktualitas dan relevansi, yakni untuk mengubah cita-cita menjadi realitas.

Alasan kedua adalah, bahwa Kebangkitan Nasional harus dipahami sebagai bagian dari sejarah kehidupan bangsa yang sifatnya evolutif, berpangkal dari sekelompok pemuda yang beridealisme untuk bernegara, bermasyarakat dan mengembangkan diri. Dari aksi pergerakan yang menyuarakan kepentingan cita-cita ini pada akhirnya menumbuhkan ideologi kebangsaan Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya semangat kebangsaan kemudian memformulasikan diri secara lebih nyata dalam salah satu sila Pancasila, yakni sila Persatuan Indonesia. Oleh karena sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan dan kebulatan yang utuh, maka pemahaman serta pengamalan satu sila haruslah terkait dengan sila-sila yang lain. Demikian pula halnya dengan semangat kebangsaan yang terkandung dalam sila ketiga, pemahaman serta pelaksanaannya secara operasional tidak dapat dilepaskan dari sila lainnya.

Inilah pula yang memberikan "unikum" semangat kebangsaan Indonesia, dan menjadikannya berbeda dengan semangat kebangsaan lain, yakni semangat kebangsaan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berdasar demokrasi kerakyatan dan berkeadilan sosial. Mengutip pendapat Soedjono Hoemardani, maka "unikum" dan kekhasan semangat kebangsaan yang berdasar Pancasila ini justru menjadikannya semakin kokoh dalam berfungsi sebagai pilar penyangga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. "Memang suatu negara yang kuat sentosa itu adalah negara yang disusun dengan berdasar kepada struktur masyarakat dan alam kebudayaan masyarakat. Dengan demikian maka negara ini menjadi manunggal dengan kehidupan masyarakat, karena negara kita didasarkan atas struktur masyarakat. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang didasarkan pada struktur dan kultur kebangsaan kita."³ Dapat dikatakan operasionalisasi semangat kebangsaan pun tidak boleh tercabut dari lingkungannya yaitu struktur dan kultur masyarakat Indonesia, dan juga harus tetap bertumpu pada pedoman Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Kebangsaan.

³Soedjono Hoemardani, *Pangkal Tolak bagi Peranan Kader Bangsa*, di dalam Mandiri Thamrin Sianipar (ed.), *Pendidikan Politik Bangsa* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hal. 46.

Pemahaman dan perwujudan semangat kebangsaan dalam tindakan nyata, juga berarti pengamalan sila-sila Pancasila. Peleburan semangat kebangsaan ke dalam ideologi kebangsaan semakin menunjukkan aktualitas dan relevansinya; sebab ideologi kebangsaan selain dipakai sebagai identitas yang menunjukkan kekhasan dan spesifikasi bangsa Indonesia juga digunakan sebagai pedoman atau pegangan perjuangan dalam pencapaian cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa, atau dipakai sebagai ideologi yang menyatukan.

DINAMIKA MASYARAKAT

Situasi hidup dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dewasa ini semakin majemuk, bergerak makin cepat dan jangkauan-nya semakin mengkait. Gerakan pembangunan pada segala sektor baik politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan pada gilirannya akan mengubah keadaan masyarakat. Terbawa arus internasionalisasi, maka persinggungan dengan dunia luar tidak mungkin dihindari, dan hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan menghadirkan pengaruh perubahan ke dalam tatanan kehidupan sosial. Tingkat kesejahteraan berubah, juga pendidikan, struktur masyarakat, maupun perubahan dalam pola hubungan. Perubahan ini bukannya tidak berdampak. Di samping memberikan dampak positif, dapat pula mengakibatkan hal-hal yang justru menimbulkan kekisruhan. Keadaan inilah yang sekaligus melahirkan tantangan untuk mewujudkan aktualitas dan relevansi semangat kebangsaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yakni menggerakkan semangat kebangsaan guna menjawab segala permasalahan yang timbul dalam situasi dan kondisi yang amat berbeda dibanding saat pertama kali semangat kebangsaan tumbuh. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan semangat kebangsaan dalam bentuk yang tepat akan semakin terasa diperlukan sesudah disadari bahwa dalam era pembangunan nasional ini dunia sarat dengan berbagai macam krisis dan persoalan. Ini berarti bahwa semangat kebangsaan perlu dihayati secara dinamis dan kreatif.

Sesuai dengan ideologi kebangsaan yang dalam pedoman penghayatan dan pengamalannya didasarkan atas kemampuan dan kelayakan manusiawi, maka semangat kebangsaan sebagai salah satu elemen dari padanya juga menampakkan sisi-sisi yang luwes. Dengan demikian di dalam pergumulannya masyarakat akan mudah menemukan hakikat semangat kebangsaan ini justru dalam dinamika kehidupannya. Selanjutnya dinamika semangat kebangsaan akan semakin menunjukkan bentuknya yang nyata dan akan tetap "exist" bila dapat memberikan kemanfaatan dan pengaruh positif terhadap berbagai problem yang tengah dihadapi masyarakat.

Apabila pembangunan sektor ekonomi, politik, sosial budaya memberikan hasil yang menampakkan kesan tetap terjaganya kesatuan dan persatuan.

Juga jika pembangunan semakin dapat menebalkan rasa kebanggaan akan hasil sendiri, serta memberi gambaran semakin mengentalnya rasa solidaritas sosial, maka itu menjadi bukti bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat bukannya tanpa arah, tetapi tetap terkendali dan merupakan paduan dari suatu konsep pembangunan yang semakin memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ganjalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mengarahkan agar pergumulan masyarakat dalam menghayati semangat kebangsaan dalam kondisi majemuk dan amat dinamis ini menghasilkan bentuk dan produk kerja yang mencerminkan adanya semangat kebangsaan, artinya semangat kebangsaan terejawantah di dalamnya. Dengan perumusan lain, semangat kebangsaan dapat menjadi pendorong dalam melaksanakan bentuk-bentuk kerja dan akhirnya semangat kebangsaan pula yang diharapkan terkandung dalam hasil kerja.

Satu hal yang dapat dikemukakan untuk "mengeliminir" ganjalan tersebut adalah bahwa seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menggumuli segala macam persoalan yang berkaitan dengan tatanan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini tidak hanya dimungkinkan melalui jalur pemerintah saja, namun juga dapat melalui berbagai jalur dan forum lain. Sebab di sini tidak hanya dituntut hal-hal yang bersifat politis dan "dogmatis," tetapi lebih dari itu diperlukan hal-hal praktis dan realistis yang secara perlahan-lahan tetapi berkesinambungan menanamkan dan menuntun masyarakat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam semangat kebangsaan itu sendiri. Atas dasar ini akan terjadi proses otoidentifikasi atau pengenalan diri yang selanjutnya berkembang dan membuahkan otoaktivitas. Sehingga timbul kesadaran sebagai bangsa yang hidup menghayati dan melaksanakan cita-cita serta dasar kebangsaannya. Meningkatkan sifat ksatria, tanggung jawab, solidaritas, tenggang rasa, disiplin dan sebagainya yang kesemuanya dapat memberikan penanaman reflektif atas nilai-nilai kebangsaan.

Penanganan hal-hal di atas, agaknya perlu tetap bertolak dari kesadaran dan kondisi masyarakat. Di samping bertumpu pada dinamika inti yang dimiliki serta berlandaskan pada kesadaran dan pengalaman yang konkret. Maknanya ialah bahwa pengarahan dan pembinaan tersebut terkait dengan keadaan atau peristiwa yang biasa dihadapi atau dialami masyarakat itu sendiri.

Satu contoh adalah upaya memelihara semangat kebangsaan yang berkekuatan, yaitu pembinaan yang mengarahkan agar umat beragama taqwa di dalam menjalankan ibadah masing-masing, tanpa mengabaikan persatuan

bangsa dengan saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama yang berlainan. Selanjutnya dalam bidang hukum, dewasa ini tengah diupayakan secara terus-menerus menciptakan sistem hukum yang ditujukan bagi pemerataan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan. Tindakan ini mutlak diperlukan dalam negara hukum di samping juga sebagai cerminan adanya semangat kebangsaan yang berperikemanusiaan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Pesta demokrasi yang hendak dilangsungkan tahun 1987 mendatang, juga dapat digunakan sebagai wahana upaya menebalkan semangat kebangsaan yang berdasar demokrasi kerakyatan. Kesungguhan tekad dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia adalah bukti bahwa semangat kebangsaan yang berdasar demokrasi kerakyatan telah mewarnai langkah-langkah bangsa Indonesia dalam kerja politiknya.

Penciptaan sistem perpajakan yang semakin adil yang mencerminkan solidaritas dalam memikul beban pembangunan serta pengaturan sistem perekonomian yang memungkinkan setiap warga negara memasuki dunia usaha tanpa dihambat oleh "privilege" dan birokrasi, adalah contoh yang mengedepankan kegiatan pembangunan sebagai usaha memelihara rasa kebangsaan yang berkeadilan sosial.

Hal-hal yang dikemukakan di atas dipakai untuk menunjukkan bahwa upaya memelihara dan mengungkapkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam semangat kebangsaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha konkret yang bersifat lebih realistis, sehingga sesuai dengan tuntutan jaman.

DORONGAN DAN TANTANGAN

Sudah barang tentu selain faktor-faktor pendorong, banyak pula tantangan yang mesti dilewati dalam perjalanan suatu bangsa untuk mewujudkan cita-citanya. Selain faktor-faktor pendorong yang bersifat mempersatukan seperti kesamaan pandangan hidup, kesamaan cita-cita, sosial budaya, faktor pendorong yang lain berupa hasil-hasil positif usaha-usaha pembangunan. Di antaranya adalah semakin canggihnya sistem komunikasi, sistem administrasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sosial-budaya serta tatanan kehidupan politik yang semakin melembaga. Sedangkan faktor-faktor yang masih merupakan tantangan dalam upaya menebalkan semangat kebangsaan dan mewujudkan cita-cita persatuan kesatuan adalah sebagai berikut:

Yang *pertama*, yakni masih dirasakannya distribusi pendapatan yang belum merata antar-anggota masyarakat, sehingga terjadi pengelompokan an-

tara mereka yang memperoleh banyak dan yang memperoleh sedikit. Menjadi mudah dipahami jika kesenjangan yang terjadi ini menimbulkan jarak sosial yang tak jarang kemudian menjelma sebagai kecemburuan sosial dan akhirnya membuahkan berbagai macam konflik akibat perbenturan antara berbagai macam kepentingan yang berbeda. Konflik dan friksi ini tentu saja akan segera mempengaruhi bangsa dan negara secara keseluruhan.

Kedua, Pemerintah Belanda ternyata meninggalkan warisan yang kurang menguntungkan, yakni pemisahan yang dogmatik struktural antara orang-orang Cina dan pribumi. Inilah yang sekarang muncul sebagai problem pembauran yang bukan hanya merupakan problem politis namun juga merupakan problem sosiologis dan psikologis. Dalam interaksi antara pribumi dan minoritas Cina, intensitas konflik antara keduanya sering berkaitan dengan dominasi kelompok minoritas Cina di sektor ekonomi. Dampak negatif yang muncul dari padanya adalah tumbuhnya sikap dan perilaku psikologis yang diwarnai kecurigaan, saling asing dan semakin membentangkan jarak yang mempersulit adanya solidaritas bersama. Menghadapi masalah ini, maka gagasan diversifikasi profesi di kalangan minoritas Cina tampaknya semakin perlu dipacu, tanpa mengabaikan kendala-kendala yang bakal timbul. Misalnya sejauh mana sektor non-ekonomi telah dipersiapkan sehingga benar-benar dapat menerima kehadiran minoritas Cina tanpa mengalami perbedaan perlakuan dengan pribumi.

Tantangan yang *ketiga* adalah berkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan yang merupakan hal cukup penting dalam kerangka mempertebal wawasan kebangsaan. Sampai seberapa jauh upaya pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan antardaerah propinsi serta antara kota dan desa di Indonesia perlu memperoleh perhatian seksama. Ini perlu untuk menjembatani disparitas pendapatan yang berbeda antara satu daerah dan lainnya. Sebagai langkah yang secara tidak langsung ikut meredakan faktor pemisah antar-etnik dan menutup terjadinya pergesekan-pergesekan regional. Pentingnya penanganan sektor ekonomi berkaitan dengan usaha memperkuat semangat kebangsaan ditunjukkan pula oleh Sigit dan Suparlan bahwa, meskipun hubungan antar-etnik (baca: suku) di kota-kota pada umumnya relatif akrab dan berjalan lancar, namun terkadang timbul pula konflik yang disebabkan oleh persaingan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi serta persaingan dalam perebutan posisi, karena dianggap bahwa tiap etnik memiliki spesifikasi penguasaan dalam jabatan tertentu.⁴

⁴Suparlan, P & Sigit, H., *Culture and Fertility: The Case of Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1980)

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam dinamika dan perkembangan masyarakat sekarang ini, usaha mempertebal semangat kebangsaan bukan hanya berkaitan dengan masalah ideologi dan politik saja, tetapi juga berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial budaya dan tidak ketinggalan masalah pertahanan dan keamanan.

PENUTUP

Semangat kebangsaan, idealisme dan jiwa patriotisme sebagai unsur-unsur yang tergalang menjadi satu dan akhirnya menjadi pendorong berdirinya republik ini, di masa sekarang memerlukan "jurus" tertentu untuk melestarikannya. Meskipun sebenarnya tidak perlu diragukan lagi relevansi dan aktualitasnya tatkala bersinggungan dengan segala permasalahan, bahkan yang maha rumit sekalipun yang tengah dihadapi oleh suatu bangsa yang menegara.

Berbagai macam peluang dapat dipakai sebagai tempat melancarkan "jurus" tersebut, sehingga warisan berharga yang memiliki nilai luhur tetap relevan, dihargai dan dilestarikan oleh para ahli warisnya.

Perubahan Masyarakat: Beberapa Masalah Pergeseran Peranan Para Pemuka Masyarakat

SOEKANTO*

Setiap masyarakat, betapapun sistem sosial dan kebudayaannya masih sangat sederhana, senantiasa mengalami perubahan.¹ Perubahan tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu karena bertambah besarnya jumlah anggota masyarakat, semakin berkurangnya daya dukung lingkungan hidup, penemuan-penemuan baru, pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, pemberontakan, perang ataupun revolusi. Ini semua dapat menimbulkan perubahan dalam sistem sosial, baik mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, interaksi sosial, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, maupun mengenai lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenangnya.²

Mengenai arah perubahan masyarakat, seorang sosiolog yang juga dikenal sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte, mengatakan bahwa perkembangan masyarakat melewati tiga tahap sesuai dengan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia, yaitu: tahap teologi, tahap metafisika, dan kemudian tahap positif.³ Secara ekonomi, W.W. Rostow, mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat melalui lima tahap pertumbuhan, yaitu: tahap masyarakat tradisional, prasyarat menuju lepas landas, lepas landas, gerak menuju kematangan, dan kemudian tahap konsumsi massa tinggi.⁴ Sementara itu, Alvin Toffler, berpendapat bahwa hingga kini dunia telah dilanda tiga gelombang peradaban. Gelombang peradaban pertama ditandai dengan ketergantungan

*Staf CSIS.

¹Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed.), *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hal. 487.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 303.

³*Ibid.*, hal. 399.

⁴W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (London: Cambridge University Press, 1971).

manusia pada alam, gelombang peradaban kedua mengutamakan kekuatan fisik manusia, dan gelombang peradaban ketiga yang melanda dunia sejak tahun 1970-an lebih mengutamakan kekuatan otak manusia.⁵

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan adanya persamaan, yaitu masyarakat cenderung berkembang ke arah yang lebih maju. Hal itu terjadi terutama karena semakin tumbuh dan berkembangnya pengetahuan ilmiah, yang kemudian secara bertahap mampu melahirkan penemuan-penemuan baru, baik mengenai unsur-unsur kebudayaan material maupun non-material.⁶ Ini semua lambat laun mempengaruhi dan kemudian menimbulkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga ada kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berkurang peranannya, bahkan kemudian tidak berperanan sama sekali, tetapi juga muncul dan berperannya kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan baru. Pergeseran peranan tersebut seringkali juga diikuti pergeseran peranan para pemimpin ataupun pemuka masyarakat.

Perubahan-perubahan sosial semacam itu juga terjadi dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, ada kesan bahwa perubahan-perubahan tersebut berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju. Di negara-negara maju, perubahan sosial dan kebudayaannya berkembang secara bertahap, mulai dari tahap pertama hingga tumbuhnya masyarakat yang modern sekarang ini. Akan tetapi, faktor-faktor kemajuan atau modernitas dari setiap tahap perkembangan di negara-negara maju banyak yang melanda masyarakat Indonesia secara serempak.

Apalagi setelah Proklamasi Kemerdekaan, dan lebih-lebih setelah dilaksanakannya pembangunan nasional sejak tahun 1969, banyak unsur-unsur kebudayaan asing yang sengaja dimasukkan serta semakin menderasnya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat menjadi semakin kompleks. Akibat-akibatnya, antara lain adalah timbulnya perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, sehingga ada pemimpin atau pemuka masyarakat yang berkurang, bahkan kehilangan peranannya dalam masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa pergeseran peranan para pemuka masyarakat tersebut seringkali ditanggapi secara tidak wajar, sehingga kemungkinan timbulnya konflik sangat besar, yang justru akan menghambat proses perkembangan masyarakat dan negara bangsa.

⁵Alvin Toffler, *The Third Wave* (New York: William Morrow & Company, 1980).

⁶D.P. Johnson, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Teori-teori Sosial," di dalam Aminuddin Siregar (ed.), *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hal. 2.

PERGESERAN PERANAN PEMUKA MASYARAKAT

Masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Tumbuhnya masyarakat bangsa Indonesia dengan wujudnya yang sekarang ini melalui proses perubahan dan perkembangan yang amat panjang. Semula, secara horisontal struktur sosialnya terdiri dari berbagai kesatuan sosial yang berbeda satu dengan lainnya, baik karena perbedaan suku, adat, daerah, ras, maupun perbedaan agama dan kepercayaan. Di samping itu, secara vertikal struktur sosialnya pun terdiri dari banyak lapisan sosial. Lagi pula, setiap kesatuan sosial masih terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial dan setiap kelompok sosial itu pun mempunyai kebudayaan khusus sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya.⁷

Dengan adanya pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun masyarakat itu pun mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang menonjol, antara lain adalah akibat pengaruh kebudayaan Hindu, Budha, Islam, dan kemudian Barat. Lebih-lebih setelah tahun 1800, perkembangan dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan semakin meningkat. Sejak itu, bermunculan golongan-golongan sosial baru, yaitu golongan pamong praja bangsa Belanda, golongan pegawai orang-orang bumiputera, golongan pengusaha partikelir bangsa Eropa, golongan akademisi orang-orang bumiputera, golongan menengah baru orang-orang bumiputera yang memiliki usaha di bidang perniagaan dan kerajinan, dan golongan pengembara.⁸ Munculnya golongan-golongan sosial baru itu lambat-laun memudahkan peranan golongan bangsawan yang sangat feodalistis.

Perubahan masyarakat selanjutnya yang menonjol adalah setelah masuknya pengaruh nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Barat dalam awal abad ke-20. Paham itu terutama mempengaruhi para akademisi, baik yang belajar di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun demikian, seperti akibat pengaruh unsur-unsur kebudayaan Hindu, Budha dan Islam, pengaruh unsur-unsur kebudayaan Barat, khususnya nasionalismenya, juga tidak menimbulkan Baratisasi dan matinya kebudayaan Nusantara, melainkan menumbuhkan akulturasi, yaitu antara lain memacu penemuan konsep kebangsaan sendiri yang berbeda dengan konsep nasionalisme Barat.⁹

⁷Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 29.

⁸D.H. Burger, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Bhratara, 1977), hal. 82.

⁹Soepardjo Roestam, "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini Demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa," *Analisa*, XIII, No. 11 (November 1984), hal. 835.

Di samping itu, juga banyak di antara para akademisi yang mempelajari, dan kemudian terpengaruh oleh berbagai macam ideologi, seperti kapitalisme, individualisme, sosialisme, komunisme, dan reformisme Islam. Itu semua lambat laun juga menimbulkan perubahan-perubahan sosial, khususnya mengenai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatannya. Bermula muncul gerakan-gerakan sosial, yang ditandai dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan sosial, pendidikan, kebudayaan, kedaerahan dan keagamaan. Kemudian muncul gerakan-gerakan sosial yang agak luas, yaitu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang anggota-anggotanya tidak hanya orang-orang sesuku, sedaerah dan seagama. Dan, selanjutnya muncul gerakan-gerakan politik, yaitu antara lain ditandai dengan munculnya partai-partai politik yang mempunyai ideologi sendiri-sendiri.¹⁰

Dalam era kebangkitan nasional, terlihat bahwa peranan kaum bangsawan yang dalam periode sebelumnya mulai memudar, semakin tergeser oleh peranan kaum akademisi bumiputera yang mulai menonjol. Di antara para akademisi, banyak yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan Hindia Belanda, tetapi kemudian banyak yang menjadi pemimpin dan anggota gerakan kebangsaan. Perkembangan baru itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin memberi penghargaan yang tinggi kepada mereka, dan adanya kenyataan bahwa kaum akademisi memang dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas pokok yang dihadapi oleh gerakan kebangsaan.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa peranan kaum akademisi yang semakin menonjol tersebut ternyata juga mengandung benih-benih perselisihan. Karena, di antara kaum akademisi banyak yang kadar kecendekiawannya¹¹ merosot, serta banyak yang fanatik dan memutlakkan kebenaran ideologi yang dianutnya. Hal itu terlihat dengan adanya pertentangan antara golongan Islam dan komunis dalam tahun 1920-an, antara golongan Islam dan kebangsaan yang sekuler, serta antara golongan kebangsaan yang pro dan yang anti-Jepang dalam tahun 1945-an. Namun demikian, keterikatan gerakan-gerakan kebangsaan akan tujuan bersama untuk menegara yang merdeka dalam akhir era kebangkitan nasional sangat kuat dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan suku, kedaerahan, agama, golongan dan ideologinya, sehingga mereka mampu melahirkan negara merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah perubahan yang sangat cepat atau revolusi,

¹⁰Herbert Feith, "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965," di dalam Aminuddin Siregar (ed.), *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hal. 140.

¹¹Dick Hartoko (ed.), *Golongan Cendekiawan* (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hal. viii.

yaitu para warga masyarakat Nusantara memasuki kehidupan yang baru, yakni menjadi anggota bangsa dan sekaligus juga menjadi warganegara Indonesia. Sejak itu pula terjadilah perubahan-perubahan yang sangat cepat, baik dalam tatanan kenegaraan maupun dalam tatanan kemasyarakatannya. Dan, perubahan dan perkembangan tersebut juga diikuti dengan pergeseran-pergeseran peranan para pemimpin dan para pemuka masyarakatnya.

Dalam perubahan lembaga-lembaga kenegaraan, terlihat bahwa lembaga-lembaga negara bentukan Jepang dan Belanda secara cepat diganti dengan lembaga-lembaga negara baru berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kalaupun ada lembaga-lembaga kenegaraan bentukan penjajah yang masih dipertahankan, fungsi dan orientasinya disesuaikan dengan semangat revolusi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, proses pembentukan dan fungsionalisasi lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni sulit dilaksanakan. Ini terjadi terutama karena pertentangan antargolongan yang mempunyai ideologi sendiri-sendiri masih tetap berlangsung. Apalagi setelah dikeluarkannya pengumuman pemerintah tentang kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik, dan kemudian dengan diberlakukannya sistem kabinet parlementer dalam bulan Nopember 1945–1949, pertentangan ideologi tersebut semakin meningkat.

Lagi pula, dalam tahun 1945–1949, hampir seluruh kekuatan negara dicurahkan sepenuhnya untuk menghadapi Belanda yang berusaha menjajah Indonesia kembali. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila, dan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, belum sempat dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan belum sempat disosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat luas. Dalam keadaan yang demikian itu, maka banyak warga masyarakat yang tersosialisasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang dianggap lebih mapan. Oleh karena itu, maka banyak orang yang cenderung menafsirkan berbagai masalah nasional berdasarkan sistem nilai yang dianutnya. Dan, belum lagi lembaga-lembaga kenegaraan berdiri secara kukuh, terjadilah pemberontakan di Madiun dalam tahun 1948, dan kemudian terjadi pergantian konstitusi, yaitu diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam tahun 1949.

Dalam menegara, fungsi masyarakat dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan, perserikatan, perhimpunan, ataupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Perubahan dan perkembangan selama tahun 1945–1949, menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan-jabatan penting, baik dalam lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan, dipegang oleh kaum akademisi. Namun demikian, lambat-laun di antara mereka banyak yang meninggalkan orientasi kecendekiawannya. Bahkan, yang masuk menjadi anggota-anggota partai politik dan yang fanatik terhadap ideologi golongannya bertambah banyak, sehingga banyak yang terperosok ke dalam pertentangan golongan

dan ideologi. Walaupun dalam periode ini hubungan antara dunia pemikiran politik dan kekuasaan politik sangat erat,¹² tetapi karena perbedaan pemikiran-politik dan golongan-golongan politik selalu dipertajam, maka para pemimpin dan pemuka masyarakat yang sebagian besar terdiri dari kaum akademisi tidak mampu melahirkan program-program yang siap dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang Dasar Sementara 1950, yang menganut sistem demokrasi liberal, seakan-akan hanyalah memperkuat perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam periode sebelumnya. Kalau dalam periode 1945–1949 pertentangan golongan dan ideologi masih terbatas di kota-kota besar, terutama di Jakarta, maka dalam periode 1950–1959 pertentangan tersebut semakin luas. Ini terjadi, karena menjelang pemilihan umum tahun 1955, setiap partai politik berlomba-lomba membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya sampai di daerah-daerah pedesaan. Karena fanatisme golongan dan ideologi juga ditanamkan sampai ke daerah-daerah pedesaan, maka pertentangan tersebut pun menjadi semakin luas, bahkan pertentangan itu tidak lagi terbatas pertentangan politik dan ideologi saja, melainkan juga menimbulkan pertikaian sosial yang sangat sengit.

Hasil pemilihan umum tahun 1955, menunjukkan bahwa empat partai politik yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, muncul sebagai partai-partai politik yang besar. Namun demikian, hasil pemilihan umum itu ternyata tidak meredakan pertentangan politik, ideologi dan sosial. Ini terjadi, antara lain karena para akademisi yang menjadi tokoh-tokoh politik tidak lagi memperlihatkan kecendekiawanannya, melainkan lebih terlihat sebagai kaum politikus yang mengutamakan golongan dan pengikutnya. Di samping itu, dalam periode ini perjuangan partai-partai politik dalam memenangkan ideologi partainya menjadi ideologi negara semakin menjadi-jadi, sehingga pertentangan politik dan ideologi pun semakin panas. Bahkan, pertentangan tersebut nyaris meruntuhkan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memuncak dan meluasnya pertentangan politik dan ideologi tersebut turut membuka peluang kepada kaum militer untuk ikut berperan dalam kehidupan politik. Apalagi setelah pemberontakan PRRI dan Permesta dapat ditumpas secara militer, peranan militer menjadi semakin menonjol. Dan, mungkin sekali karena dukungan militer, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden berani memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam awal periode 1960–1965, Masyumi, PSI dan Murba dibubarkan, dan partai-partai politik lainnya seakan-akan lumpuh. Namun demikian, PKI yang sangat lihai mengambil hati Presiden lambat-laun memperoleh peluang untuk memainkan pelbagai peranan penting. Semakin besarnya peranan dan luasnya penyusupan PKI dalam pelbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat,

¹²Herbert Feith, *op. cit.*, hal. 144.

membangkitkan keberanian partai-partai politik lainnya dan ABRI untuk tampil kembali dalam kehidupan politik. Persaingan PKI dengan partai-partai politik lainnya dan ABRI, khususnya Angkatan Darat, semakin tajam, sehingga seringkali menimbulkan pertentangan politik. Dan, mungkin sekali setelah merasa dirinya paling kuat, PKI berani melakukan perebutan kekuasaan negara, yaitu dengan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965, yang hampir menghancurkan Negara Proklamasi.

Hingga tahun 1965, terlihat bahwa pergeseran-pergeseran peranan para pemimpin dan pemuka masyarakat dapat dikatakan belum mampu menciptakan kemajuan yang berarti bagi masyarakat dan negara bangsa. Bahkan, pergeseran peranan para pemimpin dan pemuka masyarakat yang disertai pertentangan golongan dan paham golongannya, nyaris menghancurkan negara bangsa. Setelah berulang kali terjadi peristiwa-peristiwa yang hampir meruntuhkan Negara Proklamasi, timbul kesadaran bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pertentangan ideologi, politik dan sosial adalah karena Pancasila tidak lagi dijadikan dasar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kesadaran ini semakin kuat, sehingga dalam tahun 1966 melahirkan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Sejak awal kebangkitannya, Orde Baru berusaha memperbaharui kehidupan politik, baik mengenai lembaga-lembaga kenegaraan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 baru lengkap dan bersifat definitif setelah Pemilihan Umum 1971, yang kemudian diperkukuh lagi dengan Pemilihan Umum 1977 dan 1982. Dari perkembangan lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, terlihat bahwa perkembangan lembaga eksekutif yang ditunjang oleh ABRI lebih menonjol daripada lembaga-lembaga negara lainnya. Sejak Orde Baru itu pula terlihat bahwa evolusi dari atas yang melanda lembaga-lembaga kenegaraan semakin menonjol.¹³

Setelah pembangunan nasional dalam tahun 1969, peranan lembaga eksekutif beserta segenap aparturnya bertambah luas. Kalau sebelumnya fungsi pemerintah masih terbatas pada tugas-tugas umum pemerintahan, tetapi setelah dilaksanakannya pembangunan nasional fungsi pemerintah juga meliputi tugas-tugas pembangunan. Adanya tugas baru tersebut ditanggapi oleh pemerintah dengan memperluas dan memperkuat aparatur pemerintahan beserta jaringannya, dan dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang secara khusus menangani tugas-tugas pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

Evolusi dari atas tersebut juga melanda lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ini terlihat dari adanya campur tangan pemerintah dalam pembaharuan lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu dilakukannya penyederhanaan jumlah dan

¹³R. William Liddle, "Evolusi dari Atas: Pemimpin Nasional dan Pembangunan Daerah di Indonesia," di dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 126.

struktur partai-partai politik. Dari proses penyederhanaan tersebut, kini terlihat adanya dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan satu golongan karya, yaitu Golongan Karya. Dan, struktur kepengurusannya juga disederhanakan, yaitu hanya sampai Daerah Tingkat II atau Kabupaten.

Di samping itu, juga diadakan penyederhanaan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, ternyata tidak hanya memberi peluang berdirinya partai-partai politik, melainkan juga tumbuhnya organisasi-organisasi massa. Sejak itu bermunculan organisasi-organisasi massa baru, baik yang berafiliasi maupun yang tidak berafiliasi kepada partai-partai politik. Kemudian, juga bermunculan organisasi-organisasi fungsional, tetapi banyak diantaranya yang berafiliasi kepada partai-partai politik. Oleh karena itu, dalam tahun 1945–1965 pola kehidupan kelembagaan dalam masyarakat sangat kacau. Setelah bangkitnya Orde Baru, pola kehidupan kelembagaan tersebut hendak ditata kembali, yaitu diorientasikan pada program sesuai dengan profesi dan fungsinya masing-masing. Dengan semakin berkembangnya diferensiasi dan spesialisasi, maka hal itu membuka peluang bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan profesi dan fungsi untuk tampil dalam kehidupan negara dan masyarakat, seperti IDI, PII, PWI, dan lain-lainnya; serta, munculnya organisasi-organisasi profesi dan fungsional baru, seperti HKTI, HNSI, SPSI, KNPI, dan sebagainya.

Dari perkembangan kehidupan kelembagaan sejak bangkitnya Orde Baru, terdapat kesan bahwa peranan kaum militer atau ABRI dalam menegara lebih dominan daripada golongan-golongan lainnya. Kemudian, setelah gencarnya pembangunan nasional sejak tahun 1969, kaum birokrat yang dalam periode sebelumnya tidak menonjol, bangkit kembali dan memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Ini terjadi, terutama karena dengan diadakannya pembangunan nasional, fungsi birokrasi tidak hanya menangani tugas-tugas umum pemerintahan saja, melainkan juga mendapat tambahan tugas baru, yaitu tugas-tugas pembangunan. Tugas-tugas pembangunan itu meliputi tugas tugas pengarahan, pembimbingan dan penggerakan masyarakat, sehingga nantinya usaha-usaha pembangunan dapat ditangani sendiri oleh masyarakat secara baik.¹⁴ Namun demikian, dalam perkembangannya peranan birokrasi, beserta kaum birokratnya, semakin dominan dalam pembangunan, bahkan hampir seluruh usaha pembangunan ditanganinya sendiri. Bila kecenderungan dominasi birokrasi tersebut tidak diimbangi dengan mendorong organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperanan dalam pembangunan, maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara birokratik.

Kelompok-kelompok sosial lainnya yang mempunyai peranan penunggal dalam era Orde Baru adalah kaum akademisi. Namun demikian, karena kaum

¹⁴Soewarno Hadiatmodjo, "Peranan Administrasi Negara dalam Mensukseskan Repelita III," *Administrasi Negara*, XIX, No. 24, hal. 7.

akademisi terdiri dari banyak lapisan,¹⁵ yang juga berbeda-beda orientasinya, maka kekuatan dan peranannya pun tidak terpadu. Di antara kaum akademisi, yang peranannya sangat menonjol adalah mereka yang menangani manajemen pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum teknokrat. Selanjutnya, adalah mereka yang menangani pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan teknologi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum ilmuwan. Dan, kemudian mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum pekerja kantor atau *the white-collar workers*, seperti para hakim, jaksa, dokter, insinyur, ahli hukum, dan kaum profesional lainnya.

Di samping berlangsungnya evolusi dari atas, dalam era Orde Baru juga terdapat evolusi dari bawah atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi setelah dilancarkannya pembangunan nasional dalam tahun 1969 dan semakin banyaknya proyek-proyek yang dibangun. Sejak itu terlihat bahwa pelbagai bidang kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang relatif pesat. Terutama dari perkembangan bidang ekonomi, terlihat bahwa laju perkembangan sektor-sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa kemasyarakatan, lebih pesat daripada sektor pertanian. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terjadi gerak atau mobilitas sosial. Dan, dengan semakin meningkatnya sektor-sektor industri dan perdagangan, maka berarti pula bahwa penghargaan masyarakat terhadap pekerjaan dagang yang semula sangat rendah, cenderung semakin meningkat. Ini juga merupakan indikator bahwa mental pegawai dan mental priyayi yang semula dominan dalam masyarakat, cenderung semakin pudar. Dengan demikian, lambat-laun masyarakat pun tidak hanya menghargai pekerjaan halus, melainkan juga pekerjaan kasar. Bahkan, secara berangsur-angsur etos kerja dan semangat profesionalismenya pun akan semakin meningkat.

Di samping itu, perkembangan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat juga menimbulkan berbagai masalah yang kompleks, yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya secara umum, melainkan menuntut penyelesaian secara spesifik. Ini terjadi, terutama karena dalam perkembangan itu juga berlangsung diferensiasi yang semakin rumit, yang juga disertai berlangsungnya spesialisasi dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Berkembang pesatnya bidang-bidang kehidupan masyarakat itu, juga mendapat tanggapan masyarakat. Ini terlihat dengan semakin besarnya hasrat para warga masyarakat akan pendidikan, bahkan hal itu kemudian menarik perhatian generasi muda dari masyarakat yang pendidikannya murni agama. Kalau dahulu perhatian dalam dunia pendidikan dipusatkan demi tercapainya kebahagiaan di alam baka, kini jumlah orang yang berpandangan seperti itu mungkin sekali tinggal sedikit.¹⁶

¹⁵Edward Shils, "Kaum Cendekiawan," di dalam Dick Hartoko (ed.), *op.cit.*, hal.1.

¹⁶Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hal. 275.

Dari perubahan dan perkembangan dalam masyarakat tersebut, ada kesan bahwa pengaruh evolusi dari atas ataupun pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan asing relatif besar. Hal itu dikesankan dari beberapa indikator, yaitu antara lain bahwa dengan makin dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan dilaksanakannya rencana pembangunan nasional, maka peranan kaum bangsawan atau priyayi yang sebelumnya masih terasa ada, lambat-laun semakin hilang. Hasil penelitian di beberapa desa Propinsi Sumatera Barat dalam tahun 1976–1977, juga menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan dalam segi-segi kehidupan masyarakat yang bersifat peduniawian relatif besar (lihat Tabel 1). Dalam tabel tersebut terlihat bahwa wali nagari yang kekuasaannya ditunjang oleh peraturan negara merupakan pemuka pendapat yang utama. Akan tetapi, dalam tabel itu tidak terlihat seberapa besar peranan kaum ulama dan pemuka adat. Bahkan, pendapat para pedagang atau petani lebih dituruti daripada guru sekolah agama.

Tabel 1

ORANG YANG PALING DITURUTI PENDAPATNYA

Pekerjaan	Dituruti Pendapatnya (%)
Wali Nagari	60,1
Pedagang	11,4
Petani	10,5
Guru Sekolah Agama	5,9
Buruh/tukang	4,2
Guru Sekolah Umum	3,3
Pensiunan	2,6
Pegawai Negeri	1,6

Sumber: Deppen, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1978–1980*, hal. 145.

Namun demikian, walaupun wali nagari merupakan pemuka pendapat utama, tetapi dia bukanlah satu-satunya pemuka pendapat. Dengan demikian, tabel itu menunjukkan bahwa pola kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau mengalami perubahan, yaitu dari polimorfik ke arah monomorfik, atau dari multifungsional ke arah monofungsional. Lagi pula, masyarakat tidak selalu memberi penghargaan yang besar terhadap perubahan dan perkembangan akibat evolusi dari atas atau perencanaan pembangunan nasional. Ini terlihat dari berbagai indikator, yaitu antara lain adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lahirnya disponsori oleh pemerintah, seperti HKTI, MANSI, SPSI, KNPI, dan KUD, belum sepenuhnya dijadikan pusat kegiatan atau penyaluran aspirasi kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi aggotanya. Dalam Tabel 1, juga terlihat bahwa pegawai negeri yang merupakan bagian dari birokrasi yang kekuasaannya sangat besar, ternyata paling sedikit dituruti pendapatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CSIS di Yogyakarta dalam awal tahun 1985, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial yang diharapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional, yang utama adalah para akademisi, negarawan dan politikus, serta pengusaha dan wiraswasta (lihat Tabel 2).¹⁷ Dari penelitian itu, juga terungkap bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1969 menghadapi berbagai masalah. Di antaranya, adalah usaha peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, efisiensi pemerintah, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan teknologi, merupakan bidang-bidang yang paling kecil kemajuannya. Dengan demikian, besarnya harapan para responden terhadap para akademisi tersebut, mungkin didasarkan pada pemikiran bahwa masalah dan tantangan pembangunan nasional lebih menuntut penyelesaian secara rasional dan profesional. Jika dugaan itu benar, maka hal itu semakin memperkuat hasil penelitian di Sumatera Barat bahwa perkembangan pola kepemimpinan dari polimorfik ke arah monomorfik cenderung semakin luas, tidak hanya berlangsung di dalam masyarakat perkotaan, melainkan juga di dalam masyarakat pedesaan.

Tabel 2

**KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL YANG DIHARAPKAN
MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN**

Kelompok Sosial	Frekuensi(%)
1. Kaum Akademisi	42,4
2. Negarawan dan Politikus	19,2
3. Pengusaha dan Wiraswasta	11,9
4. Pekerja	6,6
5. Militer	4,6
6. Pegawai Negeri	4,6
7. Petani	4,6
8. Pemuka Agama	2,7
9. Pelajar	2,0
10. Serikat Pekerja	0,0

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih maju. Perubahan dan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri terjadi terutama akibat pengaruh langsung dan tidak langsung dari unsur-unsur kebudayaan asing, khususnya kebudayaan yang berkembang di Barat yang kini telah menja

¹⁷ Hasil penelitian belum dipublikasi.

di milik dunia, sehingga arah perkembangan masyarakat Indonesia pun mirip dengan perkembangan yang pernah dialami masyarakat negara-negara maju.

Apalagi setelah berlangsungnya pembangunan nasional dalam tahun 1969, unsur-unsur modernitas dari luar yang semakin banyak juga telah mempercepat perkembangan dalam masyarakat. Hal itu terlihat bahwa pelbagai bidang kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang relatif pesat. Dalam perkembangan itu juga terjadi diferensiasi dan spesialisasi yang semakin rumit. Dan, perkembangan yang semula berlangsung di kota-kota, kini telah melanda daerah-daerah pedesaan di seluruh pelosok tanah air. Perkembangan yang pesat itu pun telah ditanggapi oleh masyarakat luas secara positif, yaitu terlihat dengan semakin besarnya hasrat akan pendidikan. Bahkan, hasrat akan pendidikan guna meraih kemajuan tersebut telah berkembang dalam generasi muda dari masyarakat yang berpendidikan murni agama. Kecenderungan ini timbul, mungkin karena masalah-masalah pembangunan dan kehidupan dewasa ini lebih menuntut penyelesaian secara rasional dan profesional.

Perubahan nilai-nilai tersebut jelas akan mempengaruhi elemen-elemen sistem sosial lainnya, seperti kelembagaan, lapisan-lapisan sosial dan pola kepemimpinannya. Di antaranya adalah, berkembangnya diferensiasi dan spesialisasi akan semakin membatasi peranan para pemuka masyarakat hanya di dalam lingkungan bidang kehidupannya masing-masing. Dan, dengan semakin besarnya kebutuhan tenaga otak dan profesional, maka peranan para pemimpin tradisional dan agama pun akan semakin terbatas. Pergeseran peranan yang tidak menimbulkan keuntungan memang pahit, tetapi bagi para pemuka masyarakat yang kualitas kepemimpinan dan integritasnya tinggi, pergeseran peranan demi kemajuan masyarakat dan negara bangsa selayaknya ditanggapi secara dewasa.

Mobilitas Profesional Muda di Jakarta

Iwan P. HUTAJULU*

Harian Kompas pada tanggal 11 Mei 1986 menerbitkan hasil penelitian penjabarkannya tentang Profesional Muda Jakarta. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari lapisan keluarga yang sama. Lebih lanjut dikemukakan isyarat penting yang bisa ditangkap dari mobilitas tanpa pergeseran lapisan sosial adalah, adanya kemudahan yang diperoleh di dalam proses itu. Dalam soal pendidikan, jelas sudah mereka dapatkan, hampir seluruhnya berpendidikan tinggi. Apabila hasil penelitian Kompas dapat dipercaya, maka menarik untuk ditelaah mobilitas mereka, baik mengenai asal-usul maupun jenjang karir. Bagaimana peranan latar belakang status sosial ekonomi (SES) orang tua terhadap proses mobilitas kelompok profesional muda Jakarta? Dari pembahasan ini dapat diketahui sejauh mana struktur sosial di Jakarta terbuka untuk menyerap anggota barunya ke dalam lapisan sosial menengah.

KELOMPOK PROFESIONAL MUDA JAKARTA

Yang dimaksud dengan kelompok Profesional Muda Jakarta adalah 70 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Ketujuh puluh responden itu terdiri dari 25% manajer top, 50% manajer menengah, dan 25% kalangan profesional lain seperti dokter, pengacara dan konsultan. Usia mereka terdiri dari 50% antara 20 sampai 30 tahun, dan 50% lagi antara 30 sampai 40 tahun. Adapun pemilihan Jakarta hanya didasarkan pertimbangan kedekatan dengan arus modernisasi dan gerak pembangunan, yang dalam ba

*Staf CSIS.

nyak hal diduga berpengaruh terhadap identitas kalangan profesional. Mereka ini yang menurut J.A.C. Mackie adalah kelas menengah bergaji dan kelas menengah profesional, dan bukan kelas menengah wiraswasta atau kelas menengah hartawan.¹

MOBILITAS SOSIAL DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat daripada hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.² Type-type mobilitas sosial yang utama ada dua macam, yaitu mobilitas sosial yang horisontal dan vertikal. Dalam pembahasan ini hanya diperhatikan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis mobilitas sosial yang vertikal, yaitu yang naik dan yang turun. Dalam kesempatan ini permasalahan dibatasi pada mobilitas sosial yang naik. Hal ini disebabkan oleh pentingnya melihat kemungkinan pembengkakan kelas menengah yang tercermin dari hasil penelitian Kompas. Mobilitas sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu:

1. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan mana telah ada.
2. Pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok itu.³

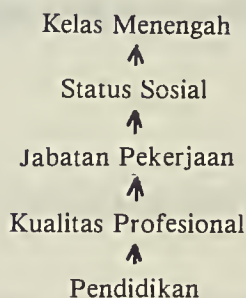
Konsep mobilitas itu akan digunakan untuk menganalisa hasil penelitian Kompas. Dalam tulisan ini hanya diperhatikan *mobilitas pendidikan*, *kerja* dan *politiknya*, karena keterbatasan data. Hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial dapat digambarkan dalam suatu model seperti berikut:

¹J.A.C. Mackie, "Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru," *Prisma* No. 2, Februari 1984, hal 31.

²Henry, Pratt Fairchild and 100 authorities, *Dictionary of Sociology*.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi - Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1977), hal. 150.

Model 1.
HUBUNGAN PENDIDIKAN TERHADAP MOBILITAS SOSIAL



Setelah menamatkan pendidikan formal, maka kualitas profesional responden akan meningkat. Yang dimaksud dengan kualitas profesional adalah kemampuan yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan etika jabatan. Kualitas profesional yang meningkat akan mendapatkan jabatan pekerjaan yang lebih baik. Pekerja profesional akan mendapat gaji yang tinggi dan status sosial. Status sosial yang diperolehnya akan menyebabkan responden memasuki lapisan sosial yang lebih tinggi yakni kelas menengah.

Bila dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua mereka, maka diketahui 66% ayah mereka berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ayah responden berpendidikan tinggi (jika dipakai ukuran pada saat orang tua mereka bersekolah dulu). Dan hanya sebagian kecil (33,8%) ayah responden berpendidikan SLP dan SD. Di samping itu sebagian besar (79,2%) ayah responden menjabat pekerjaan eksekutif/direktur dan manajer/kepala bagian. Dan 37,3% bekerja sebagai pegawai negeri, 28,3% sebagai pegawai swasta dan 16,22% bekerja sebagai pedagang besar. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai latar belakang SES menengah ke atas. Dan hanya sebagian kecil (5,9%) mempunyai latar belakang SES rendah, karena orang tua mereka bekerja sebagai pedagang kecil dan petani.

Sebagian besar responden dapat melakukan mobilitas pendidikan formalnya karena dukungan SES orang tua. Secara demikian pendidikan yang dapat dicapai mereka relatif tinggi. Data menunjukkan 7,3% responden berpendidikan pasca sarjana, 64,7% sarjana, 20,9% sarjana muda dan 7,3% SLA. Keberhasilan responden menyelesaikan pendidikannya sesuai pula dengan penemuan James S. Coleman. Penemuan itu secara singkat mengatakan bahwa hasil belajar murid pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh latar belakang sosial ekonomi keluarganya.⁴ Kenyataan ini merupakan salah satu indikator adanya mobilitas sosial tanpa pergeseran dalam struktur masyarakat.

⁴James S. Coleman, dikutip dari Waskito Tjiptosasmito, *Memahami Pendidikan Nonformal Secara Kontekstual*, (Jakarta: BP3K, 1978), hal. 1.

Perkembangan masyarakat menurut W.W. Rostow adalah sebagai berikut: "The traditional society, the precondition for take-off, the take off, the drive to maturity and the age of high mass consumption."⁵ Meskipun penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan teori Rostow ini, tetapi teori ini tidak ada jeleknya jika digunakan untuk keperluan analisa dalam tulisan ini.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ciri masyarakat kita belum memasuki tahap take off atau lepas landas. Dari GBHN diketahui bahwa masyarakat kita akan memasuki tahap tinggal landas pada Repelita VI. Atau dengan kata lain, masyarakat kita pada umumnya masih berada di antara tahap masyarakat tradisional dan tahap kondisi sebelum lepas landas. Lebih lanjut Rostow menyebutkan bahwa salah satu ciri masyarakat tradisional adalah sistem masyarakat agraris pada susunan struktur sosial. Pada masyarakat yang demikian masih terdapat hubungan antara keluarga dan suku dengan organisasi sosial untuk mobilitas vertikal.

Ciri lain yang menandai adanya perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern adalah perubahan orientasi status. Perubahan dari *Ascribed status* menjadi *Achieved status*. Yang dimaksud dengan *Ascribed status* adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena *kelahiran*. Adapun yang dimaksud dengan *Achieved status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran (keturunan), kedudukan formalnya, tetapi ditentukan pada apa prestasinya (*achievement*) dan sumbangannya terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat.

Pembengkakan lapisan kelas menengah membutuhkan syarat terbukanya struktur masyarakat. Dalam kondisi ini dimungkinkan gerak sosial vertikal ke atas dari lapisan bawah. Semakin terbuka struktur masyarakat, semakin besar kemungkinan anggota masyarakat lapisan bawah dapat melakukan mobilitas vertikal. Menurut Coxon dan Jones, tergantung pada tingkat keterbukaan masyarakatnya bahwa kedudukan sosial ayah dapat dianggap memiliki suatu pengaruh yang lebih besar ataupun kurang terhadap kedudukan yang secara bertahap dicapai anaknya.⁶ Struktur masyarakat Jakarta dapat dikatakan kurang terbuka bagi mobilitas vertikal ke atas. Hal ini ditunjukkan dari sebagian kecil (5,9%) responden berasal dari pedagang kecil dan petani yang berhasil melakukan mobilitas vertikal.

⁵Andre Gunder Frank, "Sociology of Development and Underdevelopment of Sociology," dalam James D. Cockroft, Andre Gunder Frank dan Dale L. Johnson: *Dependence and Underdevelopment*. (Garden City: Double Day, 1972), hal. 325.

⁶A.P.M. Coxon dan C.L. Jones, *Social Mobility* (Bungay, Suffolk: Richard Clay Ltd., 1975), hal. 12.

Di lain pihak anggota masyarakat yang berorientasi achieved status akan berlomba meraih prestasi yang tinggi. Dalam masyarakat modern sikap mengutamakan keluarga sendiri (nepotisme) sebagai suatu dasar untuk merekrut tenaga-tenaga bagi tugas-tugas sosial lain cenderung untuk disalah-gunakan atau sekurang-kurangnya dicurigai, sedangkan dalam masyarakat tradisional itu adalah cara yang halal.⁷

Menurut Coxon dan Jones, pada waktu lahir kedudukan rata-rata anak laki-laki dari kelas menengah dianggap berhubungan dengan kemungkinan mobilitas vertikal ayahnya dan bertahan demikian sampai anaknya selesai sekolah dan memasuki beberapa lapangan kerja.⁸ Pada waktu seseorang telah menyelesaikan pendidikannya, maka ia akan memasuki lapangan kerja sebagai perwujudan dari usaha untuk meraih identitas sosial sendiri. Data menunjukkan bahwa hanya 10,6% responden memperoleh jabatan dalam pekerjaannya karena pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pendidikan terhadap mobilitas jabatan dalam pekerjaan tidak terlalu besar. Adapun 37,7% responden meraihnya berdasarkan kemampuan. Dan 17,2% menyatakan berdasarkan kerja keras. Ketiga unsur seperti pendidikan, kemampuan dan kerja keras merupakan syarat bagi seseorang yang melakukan mobilitas vertikal melalui orientasi achieved status.

Dari ketiga unsur itu, ternyata aspek kemampuan yang terbanyak digunakan untuk melakukan mobilitas ke atas dalam memperoleh jabatan. Hanya saja tidak diketahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan kemampuan. Hal ini lebih meragukan maknanya, karena penulis Kompas menyebutkan bahwa kemampuan itu juga dapat diartikan sebagai kesanggupan memutar otak termasuk bagaimana memanfaatkan koneksi. Jadi data tentang kemampuan dapat dianggap *bias*. Yang dimaksud dengan *bias* adalah kategori kemampuan kurang operasional di satu pihak, di lain pihak dapat bertumpang-tindih dengan kategori pendidikan maupun kerja keras. Ternyata 27,8% responden dapat melakukan mobilitas jabatan karena pendidikan dan kerja keras. Persentase ini akan lebih besar lagi bila ditambah dengan kemampuan. Mobilitas jabatan yang disebabkan orientasi achieved status lebih besar daripada yang diperoleh karena ascribed status. Hal ini ditunjukkan dari 22,9% responden menggunakan koneksi sebagai cara memperoleh jabatan dalam pekerjaan.

Menurut Kompas, kecenderungan ini kelihatannya ada benarnya, jika dikaitkan dengan data mengenai jangka waktu meraih jabatan. Hampir separuh

⁷Niel J. Smelser, "Modernisasi Hubungan-hubungan Sosial," dalam Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hal. 66-67.

⁸A.P.M. Coxon dan C.L. Jones, *op.cit.*

(42,3%) mengakui meraihnya dalam waktu relatif pendek (5 tahun). Di atas 5 tahun yang tercatat 57,5%. Namun bukankah ini suatu kecenderungan pula, karena diduga koneksi ikut bermain dalam waktu pendek itu. Meskipun tidak ada data yang menunjukkan bagaimana atau berapa lama responden memperoleh pekerjaannya setelah lulus pendidikan formal, tetapi bisa diduga bahwa cara memperoleh pekerjaan itu juga dipengaruhi oleh koneksi. Hal demikian dengan jelas ditunjukkan oleh hasil penelitian Harold F. Carpenter di Padang.⁹

Koneksi yang berarti hubungan. Hubungan itu bisa juga berarti hubungan primordial (seperti ikatan keluarga Paguyuban, suku, agama atau asosiasi pendidikan). Mengenai hal ini Jan Breman mengatakan bahwa setelah kelompok sosial lain berhasil melewati jalur pendidikan formal, mereka sedikit demi sedikit dapat menembus pekerjaan-pekerjaan yang dibagi-bagi atas dasar ikatan kelompok primordial itu. Pemberian pekerjaan juga diwarnai oleh hubungan berpola patron klien,¹⁰ terutama pekerjaan-pekerjaan milik mereka yang termasuk dalam lapisan tinggi. Orang-orang ini kemudian menggunakan kedudukan mereka agar menguntungkan anak-anak buahnya sendiri yang berada dalam struktur sosial yang lebih rendah. Berdasarkan penjelasan Jan Breman, maka dapat diduga sebagian (42,3%) responden menembus jaringan kerja melalui kemudahan ikatan hubungan yang berasal dari kedudukan sosial ekonomi orang tuanya. Hal itu menjadi semakin nyata, bila dilihat dari cara dan lamanya mencapai jabatan pekerjaan.

JARINGAN KELAS MENENGAH DAN FUNGSINYA BAGI MOBILITAS

Kelompok Profesional Muda Jakarta yang diteliti juga memiliki kesamaan gaya hidup dan tingkah laku yang khas, sehingga dapat menjadi alat "pemersatu" kelas menengah. Menurut H.W. Dick, keanggotaan kelas menengah bukan hanya tingkat pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga perilaku sosial yang tercermin dari privatisasi barang-barang konsumtif.¹¹

Perilaku sosial dari responden ini juga tercermin dari rumah makan yang suka dikunjunginya (favorit). Lebih sepercempat (35%) menyebut nama-nama

⁹Lihat Harold F. Carpenter, "Pendidikan dan Kesempatan Kerja: Kasus Beberapa Pemuda Padang," *Prisma*, No. 9, September 1976, hal. 68-77.

¹⁰Tentang Patron Klien, baca James C. Scott: "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia," *Journal of Asian Studies*, Vol. XXXII, No. 1, November 1972, hal. 5-37.

¹¹H.W. Dick, "The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equality in Indonesia: an Interpretation," *Indonesia*, No. 39, April, 1985.

seperti Gandy Steak, American Hamburger atau Kentucky Fried Chicken. Sebagian lagi (37,5%) memilih rumah makan Lembur Kuring atau Warung Sate Tegal, Mandarin 20% dan Jepang-Korea sebanyak 7,5%. Di rumah makan mereka bisa bertemu relasi, seperti yang terekam oleh Kompas. Hal ini juga dapat berarti keinginan untuk selalu dekat dengan kelompoknya. Kenyataan ini dapat dijelaskan karena mobilitas sosial mereka lebih didasarkan pada peranan koneksi (baik dalam cara memperoleh pekerjaan dan jabatan pekerjaan), maka dorongan untuk selalu dekat dengan kelompoknya tidak dapat dihindari. Di dalam jaringan hubungan yang luas itu terjadi tukar menukar barang, jasa dan gagasan.

Perilaku sosial yang lain dalam bidang olah raga tercermin dari 32% responden memilih bowling, 28% golf, 20% tennis, 12% driving dan 8% main radio CB. Dengan bowling dan golf, mereka (60%) bisa bergaul dengan orang-orang penting. Orang-orang penting yang dimaksud itu dapat diduga adalah dalam rangka membina hubungan baik dengan kalangan birokrat, yang dapat diharapkan membantu proses mobilitas mereka. Tentang hal ini Coxon dan Jones berpendapat bahwa jaringan hubungan itu juga pusat untuk memperoleh informasi tentang pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja, dan jaringan itu memegang hampir semua mutasi jabatan penting.¹² Pelbagai jaringan itu sekaligus merupakan saringan mobilitas karir profesional.

Berger berpendapat bahwa mobilitas sosial yang disertai dengan mobilitas geografik tidak dengan sendirinya harus memperlemah ikatan hubungan primordial. Hal itu hanya terjadi apabila karena mobilitas sosial dan geografik itu kehidupan orang mendapat arti baru. Dengan lain perkataan: apabila mobilitas sosial itu berarti, bahwa orang pindah ke dalam (sub) kebudayaan lain dan dengan demikian mendapat identitas lain. Dalam hal yang demikian memang hubungan antar-anggota keluarga menjadi renggang.¹³

Mobilitas geografik ternyata tidak mempunyai arti perubahan ke dalam sub kebudayaan kota (urbanisme) pada sebagian besar responden. Hal itu dapat karena di kota Jakarta tidak terdapat suatu kebudayaan yang dominan yang dapat menjadi alternatif. Gejala itu ditunjukkan dari lebih seperempat responden (30,3%) ikut aktif dalam paguyuban-paguyuban kedaerahan: keluarga Banyumasan, Pekalongan, arek-arek Suroboyo dan banyak lagi. Hal ini menunjukkan ciri sistem masyarakat agraris pada susunan struktur sosial masih terdapat hubungan antarkeluarga dan suku dengan organisasi sosial untuk mobilitas vertikal. Oleh karena itu mereka harus memelihara kesetiaan hu-

¹²A.P.M. Coxon dan C.L. Jones, *op.cit.*, hal. 15.

¹³Berger, dikutip dari Prof. Dr. J.W. Schoorl, *Modernisasi* (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 279.

bugan primordialnya. Dalam perkumpulan paguyuban itu mereka dapat mengukuhkan statusnya, sambil berusaha melakukan lobby untuk meraih jabatan yang lebih bergengsi.

Menurut Farchan Bulkin,¹⁴ nasib kaum profesional dan kelas menengah di negara berkembang ditentukan oleh unsur-unsur non ekonomis, seperti hubungan politik, kekeluargaan dan kebetulan-kebetulan sosial yang lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Farchan Bulkin, bahwa kaum profesional dan kelas menengah menjadi sangat tergantung pada negara dalam bentuk kebijaksanaan ekonomi maupun bentuk sumber-sumber kontrak dan pekerjaan-pekerjaan besar. Hal ini terjadi karena konsentrasi perekonomian pada negara.¹⁵ Selama kenyataan ini berlangsung terus, maka kelompok profesional muda Jakarta akan terdorong untuk selalu berusaha mendekat dengan birokrasi.

Dalam situasi di atas, bagaimana sikap politik mereka? Apakah kelompok profesional muda di Jakarta itu yang juga merupakan bagian dari kelas menengah dapat diharap sebagai penggerak pembaharuan dalam bidang politik dan sosial budaya? Menurut Soetjipto Wirosardjono, kelas menengah merupakan motor penggerak terhadap perubahan dan pembaharuan, baik di lingkungannya maupun dalam tingkat nasional.¹⁶ Dari jawaban responden atas pertanyaan berita apa saja yang sering dibaca dari koran, sebagai cara tak langsung untuk mengamatinnya, ekonomi/perdagangan terdapat sebagai berita yang paling sering dibaca (24,5%), lalu olahraga (19,8%), diikuti kriminalitas (14,1%), dan baru disusul berita-berita politik sebanyak 11,3%. Data ini menunjukkan bahwa paling sedikit minat dalam bidang politik. Hal ini juga dapat diartikan mereka kurang berminat menyampaikan gagasan pembaharuan kepada pemerintah. Mereka lebih tertarik rupanya pada peristiwa-peristiwa olahraga dan kriminalitas daripada masalah politik dalam negeri.

Partisipasi politik mereka hanya terbatas pada keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum. Hal itu diketahui dari tiga perempat responden mengatakan ikut dalam pemberian suara pada Pemilu 1982. Namun hampir sejumlah itu pula (68,1%) responden mengakui tidak mempunyai kelompok politik favorit. Dari jumlah itu 37,8% mengatakan pernah mempunyai kelompok politik, tetapi saat ini tidak lagi, dan 30,3% tidak pernah mempunyai kelompok politik sejak dahulu. Menurut beberapa responden, "buat apa maeam-macam di zaman sekarang, ikuti sajalah arus." Dari jawaban ini ter-

¹⁴Farchan Bulkin, "Landasan Historis Profesionalisme," *Kompas*, 14 Mei 1986.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Soetjipto Wirosardjono, "Memperkuat dan Mempertebal Lapisan Kelas Menengah," *Prisma*, No. 2, Februari 1984, hal. 71.

cermin suatu sikap menahan diri untuk berpolitik secara aktif. Dengan kata lain, mereka sebenarnya menginginkan stabilitas politik, karena daripadanya mereka mendapat keuntungan.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa mereka sebagai komponen dari kelas menengah masih merupakan kelompok yang berjuang untuk mempertahankan statusnya. Hal ini dapat diterangkan karena nasib mereka ditentukan oleh hubungan politik dengan kelas yang sedang berkuasa dalam pemerintahan (birokrat). Dengan kata lain, menandingi birokrasi membuka peluang konflik dengan pemerintah. Hal itu berarti harus menanggung risiko kehilangan lisensi, sumber kontrak dan pekerjaan besar dari pemerintah. Kehilangan itu semua berarti membahayakan status profesinya.

Keberhasilan mereka dalam meraih statusnya sekarang karena kemampuan menjalin hubungan baik dengan kalangan birokrat atau berasal dari keluarga para birokrat itu sendiri (37,3% anak pegawai negeri). Melakukan fungsinya sebagai penggerak terhadap perubahan dan pembaharuan baik di lingkungan Jakarta maupun di tingkat nasional berarti melakukan kegiatan politik dan melakukan pengawasan sosial terhadap pemerintah. Selama mereka belum mandiri, kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan sosial *lemah*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mobilitas sosial kelompok profesional muda Jakarta yang diteliti Kompas masih berdasarkan koneksi atau nepotisme, cara meraih dan mempertahankan statusnya melalui kelompok premiernya seperti Paguyuban dan kelompok interestnya. Jaringan ini sekaligus merupakan saringan bagi mobilitas karir profesional. Dalam masyarakat tradisional dan belum lepas landas menurut pengertian Rostow, realitas sosial yang berlaku sebagai faktor ekstern masih menghendaknya.
2. Kenyataan itu mencerminkan struktur sosial di Jakarta masih kurang terbuka bagi proses pengembangan kelas menengah. Proses mobilitas vertikal yang masih dipengaruhi oleh ikatan hubungan (koneksi) menunjukkan bahwa status yang mereka miliki diperoleh karena warisan (ascribed status) 22,9%. Di samping itu 27,9% karena pendidikannya dan kerja keras (achieved status). Adapun pengertian kemampuan dapat dikatakan *bias*. Dengan demikian mobilitas sosial vertikal responden lebih besar ditentukan oleh achieved status, di samping ascribed status masih berperan.

3. Kelompok Profesional Muda Jakarta itu masih harus berusaha untuk dapat mempertahankan statusnya. Ketergantungan mereka dengan birokrasi menyebabkan mereka tidak dapat menjadi sponsor perubahan dan pembaharuan struktur sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri. Kenyataan ini menyebabkan struktur sosial di Jakarta kurang terbuka untuk menyerap anggota barunya ke dalam lapisan sosial menengah. Dengan demikian proses terbentuknya kelas menengah di Indonesia menjadi lamban, karena masyarakat politik Indonesia bersifat patrimonial.
4. Hambatan mobilitas sosial itu disebabkan oleh penguasaan lapangan kerja dan mutasi jabatan penting oleh jaringan ikatan hubungan primordial. Masalahnya adalah ikatan primordial itu menyebabkan adanya "in group" dan "out group." Bila seorang anggota masyarakat menjadi "out group," maka ia cenderung tidak senang dan cemburu kepada jaringan hubungan primordial. Di lain pihak, bila orang itu menjadi anggota "in group" lalu *diam*.

Agar mobilitas sosial vertikal naik dapat dinikmati oleh "out group," maka unsur pendidikan, keunggulan profesional dan kerja keras dalam mencapai prestasi harus lebih dihargai oleh masyarakat. Atau dengan kata lain dalam mempersiapkan kerangka landasan untuk lepas landas yang menurut Rostow, realitas sosial harus diubah. Saringan untuk memilih tenaga kerja dan promosi jabatan dalam suatu perusahaan swasta maupun perusahaan negara (instansi pemerintah) sebaiknya berdasarkan ketiga unsur ini. Di samping itu diperlukan penanaman modal di sektor industri untuk memperluas kesempatan kerja.

ANALISA

1978—1986

Nomor-nomor tahun 1978 s/d 1983 @ Rp 500.00

- 1/1978: PERSPEKTIF 1978 *(habis)*
- 2/1978: VIETNAM-KAMBDJA, SELAT MALAKA DAN MASALAH RASIAL *(habis)*
- 3/1978: PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA *(habis)*
- 4/1978: DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL *(habis)*
- 5/1978: KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
- 8/1978: STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA
- 7/1978: BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
- 8/1978: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 9/1978: NEGARA-NEGARA ASEAN
- 10/1978: SUMPAH PEMUDA DAN PERSATUAN INDONESIA
- 11/1978: PERSAINGAN TIMUR-BARAT
- 12/1978: PEMBINAAN GENERASI MUDA *(habis)*
- 1/1979: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 2/1979: BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN *(habis)*
- 3/1979: TIMUR TENGAH DALAM SOROTAN
- 4/1979: PERATAAN PENDAPATAN
- 5/1979: FDKUS ATAS AFRIKA
- 8/1979: PERJUANGAN DUNIA BARU
- 7/1979: PERANG MELAWAN KEMISKINAN *(habis)*
- 8/1979: ASIA TENGGARA BERGDLAK
- 9/1979: STRATEGI PEMBANGUNAN DITINJAU KEMBALI
- 10/1979: MENANJAKNYA DAN PROSPEK KAWASAN PASIFIK
- 11/1979: MENUJU PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL
- 12/1979: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 1/1980: BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL
- 2/1980: PEDESAAN FDKUS PEMBANGUNAN *(habis)*
- 3/1980: KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN *(habis)*
- 4/1980: MENGAMANKAN SUPLAH ENERGI
- 5/1980: KAWASAN SAMUDRA HINDIA FDKUS KETEGANGAN
- 8/1980: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 7/1980: JEPANG DALAM DUNIA YANG BERUBAH
- 8/1980: PERJUANGAN Keadilan Sosial
- 9/1980: ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN
- 10/1980: PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT
- 11/1980: PERKEMBANGAN DI AFRIKA
- 12/1980: WANITA, HAKIKAT DAN PANGGILANNYA
- 1/1981: BERBAGAI MASALAH NASIONAL *(habis)*
- 2/1981: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1981: PEMBANGUNAN PEDESAAN *(habis)*
- 4/1981: RRC, CALON RAKSASA DUNIA *(habis)*
- 5/1981: ORIENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL *(habis)*
- 8/1981: TIMUR TENGAH PUSARAN STRATEGIS
- 7/1981: SEGI-SEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- 8/1981: PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA *(habis)*
- 9/1981: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
- 10/1981: ASIA-PASIFIK DASAWARSA 1900-AN
- 11/1981: PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI
- 12/1981: PERTARUNGAN TIMUR-BARAT
- 1/1982: PERSPEKTIF EKONOMI *(habis)*
- 2/1982: FDKUS ASIA TENGGARA *(habis)*
- 3/1982: DEMOKRASI SDAIAL
- 4/1982: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 5/1982: INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL *(habis)*
- 8/1982: HUBUNGAN UTARA-SELATAN *(habis)*
- 7/1982: PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
- 8/1982: PERSPEKTIF ASIA-PASIFIK
- 9/1982: MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN *(habis)*

- 10/1982: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL *(habis)*
- 11/1982: GARIS-GARIS BESAR PEMBANGUNAN PEDESAAN
- 12/1982: FDKUS KAWASAN SAMUDRA HINDIA
- 1/1983: SOSIALISASI
- 2/1983: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1983: PEMBANGUNAN POLITIK
- 4/1983: DINAMIKA ASIA-PASIFIK
- 5/1983: BUNGA RAMPAI PEMBANGUNAN
- 8/1983: PERKEMBANGAN DI ASIA SELATAN DAN BARAT
- 7/1983: MENGGALAKKAN PARTISIPASI EKONOMI
- 8/1983: ASIA TENGGARA DAN DUNIA *(habis)*
- 9/1983: DINAMIKA INTERNASIONAL
- 10/1983: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- 11/1983: MENUJU STRATEGI ENERGI
- 12/1983: UNI SOVIET DAN RRC

Nomor-nomor Tahun 1984 dan seterusnya @ Rp 750.00

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN INDONESIA-VIETNAM *(habis)*
- 5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- 8/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI
- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN
- 11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA
- 1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT & PEMECAHANNYA
- 2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI & POLITIK INDONESIA
- 3/1985: MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI
- 4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN
- 5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
- 8/1985: PENGALAKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH
- 7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN
- 8/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK LUAR NEGERI
- 9/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI
- 10/1985: KELUAR DARI KEMELUT EKONOMI
- 11/1985: MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN
- 12/1985: MEMAHAMI PERMASALAHAN ENERGI
- 1/1986: PETA POLITIK 1980
- 2/1986: MASALAH STRATEGI NUKLIR
- 3/1986: SWASTANISASI DAN EFISIENSI NASIONAL
- 4/1986: INDIA-INDONESIA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN

JILIDAN:

ANALISA 1979 Rp 9.000,00	ANALISA 1982 Rp 9.000,00
ANALISA 1980 Rp 9.000,00	ANALISA 1983 Rp 9.000,00
ANALISA 1981 Rp 9.000,00	ANALISA 1984 Rp 11.000,00
	ANALISA 1985 Rp 11.000,00

Pesanan per pos tambah ongkos kirim ± 15% (minimal Rp 200,00) ke Biro Publikasi CSIS.